

# REPORTASE

Journal laporan investigasi

# BURUH ANAK DI SEKITAR KITA



DESEMBER  
2012



AJI JAKARTA


 International  
Labour  
Organization

## Daftar Isi

Pengantar .....	2
Sopir-Sopir Mini Motromini Jakarta	6
Calon Pemain Timnas yang "merumput" di Jalan Raya .....	8
Sopir Anak-anak? "Belum Tahu tuha Saya" Kata Bu Menteri .....	11
Semangat Belajar Dari Bukit Sampah .....	12
Awalnya mengajari cuci tangan ...	16
Bocah Itu Tak Ragu Membunuh .....	19
Kisah Dua Bocah Indonesia di Penjara Australia .....	21
Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Waktu .....	23
Kisah Pulu Buruh Anak Di Wilayah Domestik .....	25
Mewujudkan Mimpi PRTA Melalui Sanggar Jahit .....	28
Majikan Pemberi Secercah Harapan Bagi PRT Anak .....	30
The True Sole of Indonesia's Child Laborers .....	31
Kimung Harusnya DiRumah, Bukannya <i>Ngejablay</i> .....	37

## REPORTASE

 Rizky Amelia, **Beritasatu.com**  
Ezra Sihite

 Hamludin **Koran TEMPO**

 Evi Tresnawati, **detik E-PAPER**  
Aryo Bhawono

 Adhitya Himawan **Media Pembaruan**

 Grace Susetyo **Jakarta GLOBE**

 Agustinus Da Costa **Kontan**

 Rini Kustiasih **KOMPAS**

 Agung Budi Santoso **Tribunnews.com**

 Muhammad Riduan **Graphic Designer**

 Sekretariat AJI Jakarta  
Jl. Kalibata Timur 4G No. 10 Kalibata.  
Jakarta Selatan.  
Telp/ Fax: 021 798 4105  
Email: [ajijak@cbn.net.id](mailto:ajijak@cbn.net.id)  
[www.ajijakarta.org](http://www.ajijakarta.org)






## Pengantar

**A**nak adalah warga negara yang punya hak yang dijamin oleh konstitusi. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk memiliki lingkungan yang baik dan seterusnya. Namun kenyataannya banyak hak anak masih jauh dari harapan.

Dalam sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah anak Indonesia (usia 10-14 tahun) mencapai 22 juta. Dari jumlah itu, sekitar 878,1 ribu orang anak bekerja dalam berbagai kondisi, mulai dari kondisi kerja yang tidak berbahaya hingga dalam kondisi sangat berbahaya.

Jika kita memakai data ILO yang menghitung pekerja anak dari usia 7 tahun hingga 14 tahun, jumlah pekerja anak lebih tinggi lagi: 2,3 juta orang. Sebagian besar anak-anak pekerja itu berada di wilayah Timur Indonesia. Pekerja anak di Jawa dan Jabodetabek relatif masih sedikit.

Persoalan pekerja anak ini berpotensi menjadi bom waktu yang akan menambah kompleks persoalan sosial-ekonomi Indonesia jika dibiarkan terus. Kemampuan pemerintah pun terbatas, karena hanya mampu menarik sekitar 20.000 orang pekerja anak ke



bangku sekolah atau bekerja di lingkungan yang lebih baik.

Jurnalists tentu dapat berperan dengan mengangkat isu pekerja anak di media masing-masing agar isu ini menjadi perhatian banyak pihak. Semakin banyak pihak yang terlibat, kita percaya, persoalan pekerja anak akan lebih cepat teratasi.

Apa yang Anda baca di dalam buku elektronik ini merupakan karya jurnalistik para peserta beasiswa liputan tentang pekerja anak. Program ini dirancang oleh AJI Jakarta dan ILO untuk mengungkap berbagai sisi dan fakta seputar pekerja anak di Indonesia. Di buku ini Anda akan menemukan banyak cerita yang menarik sekaligus inisiatif warga yang dapat menjadi contoh bagi pembaca untuk berperan mengurangi persoalan pekerja anak.

Mulai dari kisah anak Indonesia yang terlibat dalam gelombang pelarian warga negara lain ke Australia dan menjadi tahanan di penjara Australia. Ada juga seputar anak-anak putus sekolah yang “merumput” di jalan raya dengan menjadi supir tembak. Dan masih banyak lagi.

Akhir kata, selamat membaca.

**Umar Idris**  
*AJI Jakarta*

Artikel-artikel di dalam publikasi ini merupakan bagian dari program beasiswa media ILO. Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye yang digelar ILO melalui Proyek Pekerja Anak dan Pendidikan yang didanai Kementerian Luar Negeri Belanda. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat keterkaitan di tingkat kebijakan mengenai pekerja anak dan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kesempatan bagi pekerja anak ataupun anak-anak yang rentan untuk bekerja atas pendidikan. Kampanye ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh ILO dan para mitranya untuk menegaskan kembali upaya-upaya memerangi pekerja anak, terutama bentuk-bentuk terburuknya.



# Pekerja Anak di Indonesia

Sedikitnya terdapat 4 juta dari 58,8 juta anak usia 5-17 tahun di Indonesia yang terpaksa bekerja. Dari angka tersebut, sedikitnya 1,7 juta adalah PEKERJA ANAK. Selanjutnya, sekitar 50 persen dari anak-anak yang bekerja, mereka sedikitnya bekerja 21 jam per minggu, 25 persen bekerja 12 jam per minggu. Sedangkan mereka yang dikategorikan pekerja anak pekerja selama 35,1 jam per minggu (Survei Pekerja Anak Indonesia 2009 ILO dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia).



Tabel 1.  
Besaran Anak-anak yang bekerja dan Pekerja Anak (5 – 17 tahun) – dalam ribuan

Kategori	Laki-laki	Perempuan	Total
Jumlah anak usia 5 – 17 tahun	30.130,3	28.706,9	58.837,2
Anak yang bekerja	2.391,3	1.661,5	4.052,8
Pekerja Anak	977,1	778,2	1.755,3

**Pada kelompok usia berapakah, jumlah pekerja anak yang terbesar?** Kelompok terbesar berada di usia 15 – 17 tahun.

Tabel 2.  
Pekerja Anak (5 – 17 tahun) – dalam ribuan

Kategori	Laki-laki	Perempuan	Total
5 – 12 tahun	320,1	354,2	674,3
13 – 14 tahun	193,4	127,8	321,2
15 – 17 tahun	463,6	296,3	759,8

**Di sektor pekerjaan apakah anak-anak yang bekerja itu?**

PERTANIAN merupakan sektor terbesar tempat anak-anak yang bekerja.

Tabel 3  
Anak yang Bekerja berdasarkan sektor (5 – 17 tahun) – dalam ribuan

Sektor	Laki-laki	Perempuan
Agriculture	66,3	44,6
Manufacture	6,1	16,7
Industry	12,8	26,0
Individual and Social Services	12,8	8,2
Others	3,5	2,6

Tabel 4  
Kelompok Usia dan Bentuk Pekerjaan yang tidak diperbolehkan

Kelompok Usia	Bentuk Pekerjaan		BENTUK – BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
	Pekerjaan yang tdk berbahaya (di tempat yang tidak berbahaya)	Pekerjaan yang berbahaya	
	Pekerjaan ringan Kurang dari 3 jam per hari	Pekerjaan biasa Tidak lebih dari 40 jam per minggu	
5-12			
13-14			
15-17			

Istilah “pekerja anak” yang digunakan dalam survei mencakup semua anak yang bekerja di usia 5-12 tahun, dengan tidak melihat jam kerja mereka, pekerja anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu, serta pekerja anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu. Tabel dibawah ini menjelaskan tentang pekerja anak berdasarkan Kebijakan di Indonesia dengan lebih jelas. Warna merah menunjukkan wilayah dimana anak-anak dengan usia tertentu tidak boleh bekerja pada jumlah jam dan jenis pekerjaan tertentu. ■





# Sopir-Sopir Mini Metromini Jakarta

**Rizky Amelia,  
Ezra Sihite**  
*Beritasatu.com*

*“Kalau dijalan  
kan enteng,”  
kata Andi Ilham,  
sopir bus kota  
yang belum layak  
memiliki kartu  
tanda penduduk  
(KTP) itu.*

J arum jam menunjukan pukul 22.00, berdandan khas anak sebayanya, Andi Ilham mengenakan sepatu kets, kemeja kotak-kotak dan jins sambil mengemudikan bus metromini membelah jalanan ibu kota.

Bocah yang kerap dipanggil lam itu tidak ragu mengendarai Metromini S 75 jurusan Blok M-Pasar Minggu dengan kecepatan rata-rata di atas 60 km/jam. Pedal gas makin dalam ditekan karena jalan raya Buncit mulai terurai tidak semacet di sore hari.

Entah apa yang ada di benak lam saat memacu bus dengan

kecepatan tinggi padahal ada puluhan nyawa di dalamnya.

Sopir tembak julukannya. Anak-anak muda ini menjadi peran pengganti bagi sopir sebenarnya bus metromini atau angkutan umum lainnya. Alasan mereka mengoper pekerjaan itu karena tidak kuat terus-menerus membawa bus sampai malam hari.

lam mengaku memang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) untuk syarat layak memegang kemudi kendaraan umum.

Sejak usia 14 tahun dia diajarkan pamannya cara menyetir

bis ukuran sedang seperti metromini. Awalnya, kata dia, dimulai dengan tahap memajukan-mundurkan metromini dan ikut menjadi kondektur bis. Setelah dirasa siap oleh sopir batangan, dia diberikan kepercayaan memegang setir. Tidak sampai dua tahun lam dinobatkan sebagai sopir pengganti.

Pemilik armada metromini rupanya masih saudara jauh lam. Ia punya sekitar 13 bis sejenis.

Sekarang lam memegang armada bus dengan percaya diri. Sambil bercanda dengan kondektornya, Iyam 'menarik' busnya sambil sesekali mengisap rokok.

"Kalau dijalan kan enteng," kata dia tersenyum ketika ditanya pekerjaannya itu berat dan berbahaya bagi anak seusianya.

Bocah ini pernah mengecap bangku sekolah meskipun saat ini sedang berhenti. Menurutnya tahun ini atau tahun depan dia akan kembali melanjutkan pendidikan di SMK Pelopor Ciledug, tempatnya pernah belajar.

Namun saat ini lam tampaknya masih merasa asyik saja sebagai sopir tembak dengan pemasukan Rp 60.000 hingga Rp170.000 per hari. Setelah menyetorkan Rp120.000 kepada sopir batangan, dia berbagi penghasilan dengan kenek yang menemaninya.

Pernah anak ini bercita-cita menjadi pemain bola namun cita-cita itu kini mulai 'menguaip' tatkala dia mulai disibukkan dengan soal kerja dan uang tersebut.

"Bulan depan balik lagi

(ke sekolah)," kata lam sembari mulutnya menyeringai lebar.

Belakangan ini di jalan-jalan Jakarta terutama pada malam hari tak akan sulit menemukan para sopir anak yang mengendarai bis sedang, metromini, kopaja dan angkutan kota mengangkut para penumpang. Mereka dikategorikan anak karena usianya belum melewati 17 tahun, tepatnya berkisar sekitar 14 hingga 17 tahun.

Dari pantauan wartawan **Beritasatu.com** pekan lalu, beberapa trayek bus kota di Jakarta dan sekitarnya yang dikemudikan sopir anak antara lain, S 75 jurusan Blok M-Pasar Minggu, S 72 jurusan Blok M-Lebak Bulus, S 69 jurusan Blok M-Ciledug, S 62 jurusan Manggarai-Pasar Minggu, P 20 jurusan Senen-Lebak Bulus, P 12 Senen-Kalideres dan angkutan kota C01 jurusan Kebayoran Lama-Ciledug.

Dengan ukuran bis sedang, dalam satu metromini terdapat sepuluh hingga sebelas set tempat duduk untuk dua orang penumpang belum lagi jika ada penumpang yang berdiri bisa 10 hingga 15 orang di lorong bis-bis tua itu. Sekali angkut dengan perkiraan penuh tanpa memperkirakan penumpang turun naik, sekali perjalanan bis bisa mengangkut 30 hingga 37 penumpang.

Satu kali perjalanan, di tangan sopir anak yang belum punya SIM, puluhan penumpang merisikokan keselamatan mereka. Sopir cabutan itu juga melekatkan risiko yang lebih

besar pada diri mereka dengan bolak-balik menarik penumpang dari sore hingga malam bahkan hingga dini hari.

Tidak hanya bocah itu, Roy, 17, juga salah seorang sopir ilegal yang kadang-kadang membawa bis sedang dari Blok M tujuan Pasar Minggu atau tujuan Lebak Bulus. Roy sendiri mengaku dia hanya melakukan pekerjaan ini saat libur sekolah. Sudah dua tahun Roy berstatus sebagai sopir cabutan.

"Belum lulus sekolah, iyalah kan lagi libur," kata Roy yang memang saat ditemui sedang libur sekolah tersebut.

Namun dia tak bersedia menyebutkan nama sekolahnya.

Sopir-sopir di bawah umur ini tak lepas dari pandangan para petugas lapangan yang mengecek lalu lintas di terminal Blok M. Namun kebiasaan itu ibarat tak bisa lagi terhempang, alasannya sudah terjadi terus menerus.

Tri Unggul, petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang bertugas di terminal Blok M tak menceritakan banyak soal sopir anak itu. Hanya, dia mengakui keberadaan mereka yang menurut dia terkadang berasal dari anak jalanan.

"Kami seharusnya menindak tapi terus-menerus begitu mau diapakan," kata Tri.

## Polisi doyan duit

Sementara menurut sopir batangan metromini, aksi sopir-sopir cabutan itu pasti tak lepas dari pandangan para polisi yang bertugas di sekitar terminal Blok M.



Bajul, 22, sopir batangan S 75 yang sudah mulai menyetir metromini sejak berusia 16 tahun mengatakan setiap hari para polisi lalu lintas ada di sana.

“Polisi juga maunya duit, main duit aja goceng,” kata Bajul sebelum ‘menarik’ bisnya dari terminal Blok M.

Dia membenarkan, para sopir anak ini memulai dengan menjadi kondaktur dan belajar memajumundurkan bus sebelum akhirnya dilepas menyetir bis oleh sopir batangan. Mereka takut harus menanggung ganti rugi jika sopir anak mengalami kecelakaan. Maklum, jika terjadi kecelakaan, sopir batangan bertanggungjawab kepada pemilik bis. Para pemilik bis tak tahu-menahu jika bis mereka dipindahtangankan kepada para bocah sopir cabutan itu.

“Sopir S 75 banyak yang kecil-kecil, mereka biasanya jadi kenek dulu,” kata dia lagi.

Icha Rastikan, 23, salah satu penumpang P 20 yang beberapa kali menaiki bis yang disopiri para remaja tanggung

mengaku kadang-kadang kuatir sebab para sopir cabutan sering ugal-ugalan.

“Saya suka was-was karena mengkhawatirkan mereka masih muda dan biasanya belum berpengalaman, emosian,” kata Icha.

Icha kerap menumpang bis tersebut pada pukul 21.00 hingga 21.30 WIB.

Meskipun belum pernah mengalami kecelakaan namun potensi itu menurut dia besar tatkala para sopir anak membawa bis dengan kecepatan tinggi.

“Suka kebut-kebutan,” imbuhnya.

### Mereka tak tahu?

Sopir anak tak punya SIM, padahal berdasarkan pasal 46 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi DKI Jakarta disebutkan adanya kewajiban memiliki SIM bagi para sopir angkutan umum.

Sedangkan pada ayat dua dijelaskan bahwa sopir harus membawa SIM selama mengemudikan angkutan umum.

Saat dikonfirmasi kepada salah seorang petugas polisi yang bernama Sulaiman di terminal Blok M, petugas tersebut tak mau berkomentar seputar adanya sopir anak.

Dia mengarahkan agar wartawan **Beritasatu.com** mendatangi pos polisi yang berada di depan Blok M Square. Saat bertemu dengan Komandan Jaga, Marsono, dia mengaku tak tahu-menahu soal keberadaan sopir anak.

“Saya enggak tahu, yang jelas harus punya SIM dan itu harus punya KTP,” kata Marsono.

Mengaku lebih sering berada di pos, Marsono mengatakan rekannya Sulaiman, petugas polisi yang awalnya kami datangi, seharusnya lebih tahu.

“Saya enggak di lapangan, yang pasti kalau ada (sopir anak) harus ditindak karena berbahaya,” kata Marsono. ■





# Calon Pemain Timnas yang “Merumput” di Jalan Raya

Rizky Amelia, Ezra Sihite  
Beritasatu.com

*Sempat bergabung dengan sekolah sepakbola di Senayan, akhirnya Ilham kecil “terjerembab” di jalan raya menjadi sopir metromini.*

**L**ebih dari 10 tahun lalu, saat masih duduk di bangku taman kanak-kanak, Ilham kecil ditanya gurunya soal cita-cita. Kala itu sebagian besar temannya ingin menjadi dokter, pilot, polisi -- bahkan ada yang ingin menjadi presiden.

“Sekarang giliranmu, Ilham,” kata Bu Guru, “nanti setelah besar mau menjadi apa?”

Ilham terdiam agak lama. Ia hanya kenal satu jenis pekerjaan

lelaki -- pekerjaan ayahnya: menjadi sopir.

“Ilham mau jadi sopir,” katanya pasti.

Seisi kelas tertawa mendengar jawabannya. Ia tak tahu apa yang lucu dari jawaban itu. Baru sekarang, ketika benar-benar menjadi sopir metromini, Ilham bisa ikut tertawa.

“Ternyata sekarang benar kejadian. Aku jadi sopir,” kata Ilham kepada **Beritasatu.com** beberapa waktu lalu, sambil tertawa.

“Garis tangan” Ilham menjadi sopir mungkin tak terlepas dari pengalaman masa kecil bersama ayahnya. Ketika kecil, Ilham sering diajak “narik” oleh ayahnya yang kala itu mengoperasikan Metromini S-75, jurusan Blok M

- Pasar Minggu. Ia duduk di bangku depan, menikmati jalanan, tak jauh dari ayahnya yang sedang bekerja. “Makanya aku hafal betul jalan-jalan di sini,” katanya.

Meskipun mendapatkan pengalaman “narik” Metromini dari ayahnya, bukan berarti Sang Bapak memintanya menjadi sopir. Pekerjaan jalanan yang tergolong berbahaya ini dijadikan Ilham sebagai tempat pelarian, lantaran ia kesal dengan sekolahnya. Tahun lalu, gara-gara tak suka dengan salah satu gurunya di SMK Pelopor, Ilham kabur, meninggalkan bangku sekolah.

Luntang-lantung tanpa kegiatan, Ilham akhirnya menerjunkan dirinya ke jalanan Jakarta. Ia gentayangan di terminal, bergaul dengan sopir, dan mencoba

ikut-ikutan narik sebagai kenek.

Meskipun belum cukup umur, tak sulit bagi Ilham untuk bisa menjadi “sopir tembak” -- sebutan untuk sopir cadangan yang menggantikan sopir resmi alias sopir batangan. Awalnya, Ilham hanya ikut-ikutan narik, lalu pelan-pelan belajar memaju mundurkan metromini. Setelah dianggap cukup terampil menjalankan bis, dan dipercaya sopir batangan, maka jadilah Ilham sopir betulan -- tanpa harus punya SIM, bahkan sebelum cukup umur untuk mengenggam KTP.

Lazimnya sopir tembak beroperasi malam hari, ketika sopir batangan perlu istirahat tidur -- dan metromini harus tetap jalan untuk mendukung uang setoran. Namun Ilham bukan hanya narik malam hari. lantaran dia “meliburkan” diri dari sekolah, ia juga praktek pada pagi hari, jam sepuluh siang sampai tiga sore. “Kalau nggak kecapekan, aku narik lagi jam tujuh sampai 12 malam,” kata Ilham.

Sebagai sopir tembak, Ilham bisa menjala Rp 240.000 sehari. Tapi, tunggu dulu, upah segede

ini tidak bisa dikantongi sendiri. Separuhnya, Rp 120.000 disetor ke sopir batangan, dan separuhnya sisanya dibagi dengan kenek. Penghasilan sebesar ini, biasanya habis untuk jajan, beli rokok -- sebagian dikumpulkan untuk biaya perbaikan motor miliknya yang lagi rusak.

Ilham mengaku melakoni pekerjaan ini diam-diam. Kedua orangtuanya tidak tahu bahwa selama ini dia nyopir metromini, sama seperti ayahnya dulu. Suatu kali, ayahnya yang sekarang menyopir taxi, memergoki Ilham sedang narik. Sang Ayah marah besar. “Bapak tidak ingin anaknya mempengaruhi nyawa di jalanan. Mereka ingin saya kembali ke sekolah dan menjadi orang,” kata Ilham.

Dulu, ketika masih kelas empat SD, Ilham pernah bergabung dengan sekolah sepak bola di Senayan. Selama dua tahun, ia ikut digembleng menjadi calon pemain bola masa depan Indonesia. Ia bahkan sempat menjadi andalan tim inti sepak bola di sekolahnya. Kakak kelasnya kerap iri dengan kepiawaian

Ilham dalam sepakbola.

Sayang, prestasi ini mandeg di tengah jalan. Ini terjadi ketika Ilham mulai mengenal rokok, hingga “napasnya menjadi pendek”. Ilham tidak lagi kuat lama-lama bermain di lapangan hijau. “Padahal kalau tak kenal rokok, mungkin aku bisa kayak Andik (pemain Timnas Indonesia),” kata Ilham terkekeh. Berbeda dengan Andik yang merumput di lapangan hijau, Ilham terpaksa “merumput” di jalan raya.

Namun Ilham mengaku tidak mau terus-menerus menjadi seorang sopir tembak. Dia memastikan akan kembali ke sekolah. Ini sudah menjadi tekadnya, sekaligus mau membuktikan kepada orang tua bahwa ia bisa kembali berkompetisi di sekolah setelah istirahat belajar selama setahun. “Tahun depan aku mau sekolah lagi,” katanya yakin.

Lalu setelah itu? Ilham terdiam. Butuh beberapa menit untuk menjawab pertanyaan ini. Sembari tetap menyeter dan menghisap rokok, ia berkata, “Aku enggak tahu mau jadi apa.” ■





## Sopir Anak-anak? "Belum Tahu Saya," Kata Bu Menteri

**Rizky Amelia, Ezra Sihite**  
Beritasatu.com

*Di malam hari, anak-anak seharusnya belajar atau beristirahat di rumah, kata Bu Menteri.*

**S**opir Anak? "Belum, baru tahu saya," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari, ketika ditanya tentang maraknya sopir kanak-kanak yang gentayangan di jalan-jalan Jakarta. Mereka membawa belasan, bahkan puluhan penumpang, dengan sebuah bus umum, tanpa SIM, bahkan tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP) lantaran belum cukup umur.

Bu Menteri tampak kaget. Namun sebagaimana lazimnya para pejabat, Linda buru-buru berjanji akan "metindaklanjuti" soal itu, dengan cara "berkoordinasi" dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Menurut Bu

Menteri, dalam hal perlindungan anak, pihaknya telah mengikat kesepatan dengan pemda bahwa pemerintah provinsi harus melindungi anak-anak di wilayahnya.

Linda menyesalkan maraknya sopir tembak anak ini. Anak-anak itu mestinya bersekolah, dan pada malam hari seharusnya belajar atau beristirahat di rumah -- bukan bekerja di jalanan yang sibuk dan berbahaya seperti Jakarta. Tak hanya belum cukup umur, pekerjaan itu berisiko bagi sopir dan penumpangnya.

"Saya harap anak-anak itu tidak diberi pekerjaan berisiko," kata Linda ketika ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan.

Menteri Linda dan staf yang mendampingi mengatakan tak punya data tentang sopir anak tersebut.

Menurut data Understanding Children's Works, sebuah lembaga gabungan di bidang anak yang dibentuk oleh International Labour Organization (ILO), Unicef dan World Bank tahun 2007, anak-anak

di bawah usia 13 tahun masih status dilarang bekerja. Mereka yang berumur 13 hingga 15 tahun memang boleh bekerja, tapi hanya pekerjaan ringan dan tidak mengganggu perkembangan fisik dan mental mereka. Semua anak-anak hingga usia 17 tahun dilarang melakukan pekerjaan terburuk dan berbahaya, seperti sopir yang bisa dikategorikan sebagai pekerjaan berbahaya karena berisiko tinggi.

Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pembina Komisi Perlindungan Anak (KPA), Seto Mulyadi mengatakan masalah pekerja anak menjadi problem kompleks yang tak akan bisa diselesaikan secara instan, karena sebagian besar persoalannya bersumber pada masalah ekonomi. Seto menegaskan, membiarkan anak-anak menjadi sopir cabutan memang sudah melanggar hak anak. Sayangnya para pemangku kepentingan khususnya para petugas di lapangan kerap melakukan pembiaran dan mereka ditoleransi atas alasan kebutuhan ekonomi.

"Itu pelanggaran hak anak dan melanggar peraturan lalu lintas," kata Seto ketika dihubungi pada Sabtu (13/10) siang.

Menurut Seto, dinas perhubungan dan polisi bertindak tegas, mengingat pekerjaan sebagai sopir sangat berisiko, baik bagi si anak maupun penumpang yang dibawanya. Ketegasan ini bisa menjadi solusi jangka pendek penanganan sopir anak. Dalam jangka panjang, pemerintah harus menghidupkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat. ■



# Semangat Belajar dari Bukit Sampah

Hamludin, *Koran TEMPO*

**M**atahari belum juga muncul, Tika Lindawati sudah siap dengan keranjang yang ukurannya sepelukan orang dewasa menempel di punggungnya. Pelan-pelan anak usia 10 tahun itu memanjat gunung sampah yang menjulang tinggi persis di depan gubuk tempatnya tinggal.

Satu-satunya yang ia takutkan adalah terpeleset. Kecelakaan di lokasi sampah menjadi momok paling menakutkan bagi anak-anak pemulung di kawasan sampah Sumur Batu, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah melangkah, mereka bisa tergelincir. Resikonya tentu tertimbun sampah. Beberapa waktu lalu, seorang pria paru baya mengalami nasib naas; terperosot lalu tertimbun sampah. Tak sampai satu jam, sekujur tubuh pria itu gosong akibat terbakar gas metana sampah.

Deru mesin mobil pengeruk (Becho) hilir mudik menumpuk sampah hingga ketinggian yang kerap tak mampu dijangkau oleh pemulung dewasa sekalipun, menjadi musuh utamanya. Tika harus berlomba mengumpulkan botol air mineral, tutup galon, dan kaleng bekas, yang baru saja ditumpahkan dari bak truk sampah. Begitu beban keranjang di punggungnya kira-kira lima kilogram, ia turun dan menumpuk hasil "panen" sampah di depan gubuk. Tak perlu beristirahat lama, Tika kembali memanjat bukit sampah.

"Kalau ada Becho saya mesti menjauh, takut kelindas, suaranya keras sekali," cerita Tika, kepada Tempo, beberapa waktu lalu.

Saat matahari berada persis di atas ubun-ubun, Tika menanggalkan keranjangnya. Ia bersiap-siap berangkat ke sekolah. Kembali ke



gubuk; mandi, makan siang, lalu bergegas menuju Sekolah Alam Tunas Mulia, yang berjarak sekitar 200 meter dari gubuk tempatnya tinggal. Jam pelajaran dimulai pukul 13.00 hingga pukul 16.00 WIB. Ia kini duduk di kelas 4.

Dari sekolah tempat ia menimba ilmu, masih terlihat dengan jelas pemulung usia dewasa sibuk mengumpulkan barang bekas layak daur ulang. Sementara anak-anak yang sudah turun lebih dulu mulai hiruk pikuk di kelas masing-masing. Ada yang sudah siap dengan buku pelajarannya, sebagian lagi masih tampak asik bercerita pengalaman apapun yang mereka dapatkan hari itu.

Kepada teman-temannya, Tika mengaku tek terlalu mujur. Pada siang itu (pertengahan Oktober lalu), dia lebih banyak menjauh dari sampah "segar", sampah yang baru saja ditumpahkan dari atas truk. Akibatnya, sampah-sampah terbilang "bagus" itu lebih banyak masuk keranjang para pemulung usia dewasa. "Saya dapat sisa, takut sama becho," cerita Tika kepada rekan sekolahnya.

Sekolah Alam tak seperti tempat belajar pada umumnya yang ber dinding tembok, lantai kinclong, atap genteng, dengan struktur bangunan yang kokoh. Sekolah Alam terdiri dari delapan lokal bangunan panggung setinggi punggung orang dewasa. Lantainya memakai dipan, bagian pinggir bangunan diberi pagar bambu sebagai pembatas, dan atapnya dari daun rumbia.

Masing-masing bangunan berukuran sekitar 8x 10 meter, di sanalah siswa mulai tingkat SD, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) belajar secara berkelompok-kelompok sesuai dengan tingkatannya. Saat ini, jumlah siswa seluruhnya mencapai 230 anak pemulung.

Tika yang mengenyam pendidikan di Sekolah Alam sejak usai tujuh tahun tak pernah merasakan manisnya duduk di bangku sekolah formal. Kedua orangtuanya, Kawi, 58 tahun, dan Mimin Mintarsih, 39 tahun, sebenarnya ingin sekali menyekolahkan Tika di sekolah formal di kampung halamannya, Karawang, Jawa Barat. Namun karena alasan sulitnya ekonomi keluarga, mereka terpaksa membawa serta Tika tinggal di gubuk pemulung.

Sekolah Alam pun menjadi satu-satunya harapan sang Ibu agar anaknya memperoleh pendidikan, meski tidak ideal setidaknya ada sedikit pengetahuan. "Yang penting bisa baca tulis," terang Mimin. Dia mengaku pasrah atas nasib anaknya di hari-hari mendatang.

Namun bagi ibundanya, Tika amatlah membantu. Dengan memulung, anak ketiga dari empat bersaudara itu mampu menghasilkan uang sekalipun jumlahnya tak banyak. Dalam sehari, Tika memperoleh sekitar Rp 10.000 hingga Rp 15.000 dari hasil menjual barang bekas. Seluruh uang itu diserahkan kepada ibunya untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Anak-anak pemulung lainnya tak beda jauh dengan Tika. Ujang, Engkos, dan Imron Sulaelman, yang usianya rata-rata 12 dan 13 tahun, sejak pagi buta memanjat gunung sampah. Menggendong keranjang tuk diisi barang bekas, kemudian dijual ke pengepul. Dalam sebulan setelah hasinya dikumpulkan, mereka memperoleh Rp 300.000. Tetapi uang tersebut diserahkan semuanya kepada orang tua. "Uangnya dipake untuk bangun rumah di kampung, di Karawang, Jawa Barat," terang Imron.

Imron pernah menjadi siswa SD Tambaksari 2 Karawang, namun hanya sampai kelas 3. Setelah orangtuanya bercerai, Imron kemudian ikut ayah tirinya bernama Imam ke lokasi pembuangan sampah Sumur Batu, di Bantargebang, Kota Bekasi. Sejak saat itulah dia menjadi pemulung.

Sebelum masuk Sekolah Alam Tunas Mulia, Imron bekerja sejak pagi pukul 07.00 hingga sore hari pukul 17.00 WIB. Usianya saat itu sekitar 8 tahun. Jika sudah berada di gunung sampah, hampir tak ada waktu istirahat. Dia juga tak pernah menikmati makan siang. "Hanya makan kalau pagi dan malam hari," kata dia.

Menjadi pemulung sejak 2003 lalu, Imron mengaku untuk membantu orang tuanya. Kini, di kampung halamannya, sudah berdiri rumah Imron saat ini tercatat sebagai kelas 1 tingkat SMP Sekolah Alam Tunas Mulia. Prestasinya cukup

bagus, terakhir mendapat ranking dua. Sejak menjadi peserta didik di Sekolah Alam, jam kerjanya berkurang, hanya dari pagi hingga siang hari. Karena pada waktu siang hingga sore hari, dia harus bersekolah.

### Tak Mengenal Sakit

Suatu waktu Imron Sulaiman muntah-mutah. Badannya lemas tak bertenaga, sampai terbaring di dalam gubuk yang tak jauh dari lokasi pembuangan sampah Sumur Batu, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Usianya baru menginjak 13 tahun. Anak tersebut tak paham harus berbuat apa, sehingga hanya bisa pasrah. Mungkin, dalam benaknya hanyalah bagaimana ia bisa memejamkan mata dan saat terjaga sudah kembali sehat.

Nyatanya, kondisi itu berlangsung hingga beberapa hari. Tanpa bantuan orang dewasa, Imron tentu tidak akan paham

jika dia sakit. Anehnya, Imam tak juga paham apa yang menimpa anak tirinya itu.

Namun Imam menyimpulkan kalau anaknya muntah-muntah akibat sering main di bawah pohon lebat menjelang waktu malam tiba, bukan sakit akibat terlalu lama terpapar gas metan sampah Sumur Batu. "Saya main di bawah pohon anker, kata Bapak" Imron menceritakan peristiwa yang ia alami beberapa waktu lalu

Imron mulai ikut memulung bersama orngtuanya sejak 2003 lalu. Ia mengaku tak paham soal resiko sakit akibat bau menyengat sampah. Tak tahu apa itu gas metana sampah, penyumbang emisi karbon. Sama sekali tak terbayang olehnya. "Bapak si pernah bilang kalau sampah itu berbahaya, tetapi saya tidak pernah pakai penutup hidung dan mulut," kata dia

Masker, hampir ak pernah terlihat digunakan para pemulung. Kalau toh ada yang

menggunakan pelindung pernafasan, mereka memang kaos yang menutup seluruh kepala untuk melindungi diri dari sengatan matahari.

Ketika asik memburu sampah di ketinggian sekitar 10-15 meter, Imron beberapa kali tertusuk paku bahkan kakinya sobek setelah menginjak pecahan kaca atau botol. Kecelakaan semacam itu dianggapnya sepele, Imron hanya butuh turun ke gubuk tempatnya tinggal, mengolesi obat merah pada bagian luka, membalut dengan kain, lalu kembali berburu sampah. "Kalau luka hanya dikasih betadin," kata Imron merujuk pada obat luka yang sering dia gunakan.

Pemulung pada umumnya tak peduli berapa kali mereka muntah-muntah dalam sebulan, atau menderita diare secara berkala, apalagi mengidentifikasi sakit sesak nafas. Kawi, 58 tahun, misalnya, menilai sakit itu datang apabila mereka sudah muntah darah. Itupun tidak mau



dibawa ke rumah sakit, cukup dengan obat generik dari petugas kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bantargebang. "Kalau masih kuat mencari sampah berarti nggak sakit," katanya.

Kawi adalah orangtua dari Tika Lindawati, pemulung yang baru berusia 10 tahun. Kawi juga melihat biasa ketika anaknya lagi sakit radang tenggorokan dan batuk-batuk. "Kalau kepalanya pusing memang biasa, Tika sampai saat ini tidak pernah sakit," kata dia.

Badan Tika yang terlihat lebih kurus dan mukanya pucat, dinilai orangtuanya juga hal biasa karena sehari-hari masih ikut memulung di pembuangan sampah sejak pagi hingga siang sebelum berangkat sekolah. "Badannya memang kelihatan lemas, tapi dia kuat mengangkat sampah," terang Mimin Mintarsih, ibunda Tika.

Bagi Ujang, Engkos, maupun Imron, Sekolah Alam menjadi satu-satunya tempat menimba ilmu

demis suatu harapan yang lebih baik pada hari-hari mendatang. Dengan bersekolah, mereka ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pendiri Sekolah Alam, Nadam Dwi Subekti, mengatakan kehadiran lembaganya memang untuk memfasilitasi anak-anak pemulung memperoleh akses ke sekolah formal. Agar proses belajar mengajar mereka diakui, Sekolah Alam telah memiliki dua format pengajaran berstandar Kementerian Pendidikan Nasional.

*Pertama*, mengikuti ujian Paket A untuk siswa SD dan Paket B untuk siswa SMP dengan ijazah diakui. *Kedua*, beberapa siswa berprestasi dimasukkan ke sekolah formal di Kecamatan Bantargebang. Telah ada 10 siswa Sekolah Alam yang dibiayai sebagai siswa jurusan akuntansi di SMK Almuttaqin, Bantargebang.

Sekolah Alam terus bertekad mengembangkan metode pengajaran dan format pendidikan agar siswa dapat

menyesuaikan dengan sekolah-sekolah formal. "Sebagai pengelola saya punya harapan anak-anak pemulung mampu bersaing dalam hal kualitas keilmuan dengan siswa di sekolah umum (formal)," terangnya.

Tika, Ujang, Engkos, dan juga Imron Sulaeman, kini merasakan manfaat Sekolah Alam Tunas Mulia. Mereka yang tadinya tak pandai berhitung kini bisa menyusun perkalian dan bilangan, awalnya tak bisa baca tulis kini sangat lancar menyusun ejaan kalimat. Bagi Tika, Sekolah Alam Tunas Mulia adalah segalanya. Sekolah yang ramah terhadap anak-anak pemulung, sekolah yang mengerti kebutuhan anak pemulung, dengan segala radam kesulitan akan kehidupan mereka.

Saat dewasa nanti, Tika memendam satu hasrat besar tuk meneruskan amal baik para gurunya saat ini; yakni, membesarkan Sekolah Alam Tunas Mulia. "Saya bercita-cita menjadi guru, mengajar di Sekolah Alam," ucapnya penuh semangat. ■







# AWALNYA MENGAJARI CUCI TANGAN

**Hamludin**  
Koran TEMPO

***Sekolah Alam Tunas Mulia berdiri sebagai bentuk keprihatinan pendirinya terhadap anak-anak pemulung di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Sumur Batu dan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan anak pemulung yang tinggal di gubuk-gubuk non-permanen di kawasan itu hampir seluruhnya putus sekolah.***

**P**endiri Sekolah Alam, Nadam Dwi Subekti, 44 tahun, pada awalnya sangat sulit mengajak anak-anak pemulung dan memberi pemahaman kepada orangtua mereka soal pentingnya sekolah. Ketika membuka Sekolah Alam pada 13 Oktober 2006, tak satupun anak maupun orang tua pemulung merespons. "Mereka seperti tak yakin," kata Nadam.

Saban hari, Nadam keliling kampung pemulung. Mengetuk pintu gubuk-gubuk pemulung, dan menawarkan agar anaknya didata sebagai siswa Sekolah Alam. Namun tak satupun anak pemulung mau sekolah. Orangtua pemulung meminta anak-anaknya tetap memungut sampah daur ulang dengan alasan lebih menguntungkan.

Nadam tak patah semangat. Ide memberi imbalan jika sudi menyekolahkan anaknya di Sekolah Alam dia jalankan. Dia memberikan paket sembako



berisi beras, minyak goreng, dan mie instan senilai Rp 50.000, kepada setiap pemulung yang anaknya mau sekolah. "Orang tua mereka berpikir dapat uang pengganti dari sekolah meski anaknya tidak memulung hanya setengah hari," kata dia.

Dengan cara itu, Nadam memperoleh siswa untuk angkatan pertama sebanyak 50 anak pemulung, dengan usia rata-rata antara 7-15 tahun. Nadam juga melengkapi anak-anak pemulung dengan perlengkapan sekolah, mulai dari buku, pulpen dan pensil, dan tas sekolah agar mereka semangat belajar.

Karena belum memiliki bangunan permanen, aktivitas belajar mengajar dilaksanakan secara berpindah-pindah di gubuk pemulung. Mereka juga tidak langsung disugahi pelajaran umum seperti bahasa Indonesia atau matematika, tetapi mengajari mereka hidup bersih; mulai dari bagaimana mencuci tangan pakai sabun, mengganti pakaian yang basah kena air sampah, dan mandi menggunakan sabun.

Awalnya, kata Nadam, hampir semua siswanya datang tak memakai sandal. Mereka bahkan masih berpeluh-peluh keringat, bau sampah, dan membawa lalat. Bahkan tak jarang siswa datang dengan bertelanjang dada, dan hanya mengenakan celanan pendek. "Awalnya saya mengajari agar mereka agar bersih terlebih dulu, mulai dari yang paling sederhana yakni bagaimana cara mencuci tangan," kata Nadam.

Kepada siswanya, Nadam hanya memberlakukan aturan sederhana. Mereka boleh masuk sekolah dengan syarat mandi, dan memakai pakaian meski tak ada seragam sekolah. Tak pakai alas kaki juga tak jadi soal.

Sayangnya aturan sederhana itu sangat berat bagi anak-anak pemulung. Mengubah kebiasaan mereka yang hampir setiap saat bergumul dengan sampah, tangan dan kaki masih menempel bekas air lindi yang mengering sehingga menimbulkan bau menyengat, sulit dihilangkan. "Hampir

setahun kebiasaan itu baru bisa diubah," katanya.

Dari situ, Nadam dibantu istrinya Widiyanti, 43 tahun, pelan-pelan mengembangkan Sekolah Alam bagi anak-anak pemulung. Dia masuk kursus pendidikan sekolah alam di Bojongsukur, Vila Nusa Indah II, Kota Bekasi, untuk memperoleh tambahan informasi bagaimana cara mengelola sekolah alam bagi anak-anak pemulung.

Sepulang dari kursus sebulan lamanya, Nadam mulai membuat konsep sekolah alam, dia juga banyak berkonsultasi dengan praktisi sekolah alam. Setelah konsep jadi, dia kemudian mencari donatur tetap untuk sekolah alam anak pemulung. Upayanya berhasil, beberapa lembaga mau memberikan donasi untuk pembangunan awal Sekolah Alam, di antaranya, Yayasan Portal Infaq yang mengucurkan dana sekitar Rp 4,6 juta per bulan.

Sekitar dua tahun setelah pendirian Sekolah Alam, Nadam mendirikan bangunan semi permanen di atas lahan sewa. Seiring dengan bertambahnya jumlah siswa dan semakin banyaknya donatur yang masuk, Sekolah Alam kemudian pindah ke lahan wakaf seluas 4.200 meter per segi di jalan Pangkalan 2 RT 02/ RW 04 Kelurahan Sumurbatu. Di lahan baru ini, Nadam telah mendirikan 8 lokal, kamar mandi, kantor, musolah, kebun mini, dan peternakan kelinci sebagai tambahan keterampilan anak pemulung.

Setiap anak digelompokkan berdasarkan usia untuk menentukan mereka bisa masuk kelas berapa. Semisal, mereka yang usianya tujuh atau delapan tahun masuk kelas 1 SD, begitu seterusnya. Apabila ada anak usianya di atas 10 tahun dan belum bisa baca tulis, maka wajib mengikuti kelas SD. Untuk legalitas, Sekolah Alam telah memiliki kejar paket A dan paket B, sehingga lulusannya diakui Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Saat ini, Sekolah Alam telah memiliki 15 staf pengajar. Upah pengajar bervariasi, antara Rp 200.000 hingga Rp 450.000 per bulan. Namun gaji kecil ini tak menjadi penghalang bagi para guru untuk berbagi ilmu dengan anak-anak pemulung. Bu Ita misalnya, salah satu pengajar di Sekolah Alam Tunas Mulia, mengaku sangat menikmati berada di tengah-tengah anak pemulung. "Kalau berpikir kebutuhan tentu gaji di sini tidak cukup, tapi dengan begini saya bisa berbagi," terang Ibu Ita.

Belakangan, Sekolah Alam justru ramai dikunjungi mahasiswa dari berbagai

perguruan tinggi di Jakarta, seperti Universitas Negeri Jakarta (dulu IKIP) dan Universitas Jaya Raya. Mereka secara sukarela membantu memberikan tambahan ilmu bagi anak-anak pemulung, seperti bahasa Inggris. Fasilitas sekolah seperti tak menjadi penghambat bagi guru dan anak-anak pemulung, jumlah mereka terus bertambah hingga sekarang telah mencapai 230 siswa.

Kepala Seksi Data dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Agus Enap, menjelaskan sekolah alam masuk kategori pendidikan luar sekolah. Pasalnya, proses ujian akhir siswanya tidak sama dengan sekolah pada umum.

Untuk pendidikan berstatus pendidikan luar sekolah, Dinas Pendidikan menyiapkan anggaran untuk guru atau tutornya sekitar Rp 50.000 atau Rp 100.000 per bulan per orang. Bentuk perhatian lain, pemerintah daerah semestinya memberikan pelatihan kepala tutor sekolah alam demi peningkatan kualitas tenaga pendidik. Sebab tidak semua tutor di sekolah alam memiliki

latar belakang pendidikan keguruan, mereka kebanyakan dari profesi lain yang memiliki jiwa sosial tinggi dan mendirikan sekolah untuk anak pemulung.

Pemberian pelatihan kepada para tutor itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Guru atau Tenaga Kependidikan yang mensyaratkan guru harus S1 Kependidikan atau Akta 4. "Kalau belum, maka pemerintah Kota Bekasi harus melakukan peningkatan mutu tenaga kependidikan melalui pelatihan dan workshop," kata Agus ketika dikonfirmasi via telepon selulernya.

Agus menyarankan Sekolah Alam Tunas Mulia mengurus izin administrasi sekolah tersebut, agar dapat bantuan dana dari pemerintah, salah satunya Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dinas Pendidikan Kota Bekasi, terang Agus, juga telah memberikan akses peningkatan mutu sekolah dengan pemberian ujian paket A untuk siswa setingkat SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk siswa setingkat SMA. ■





# Bocah Itu Tak Ragu Membunuh

Evi Tresnawati, dan Aryo Bhawono

detik E-PAPER (Majalah DETIK)

*“Saya selalu menyimpan golok di balik tas yang saya gunakan sebagai bantal. Kalau mereka benar-benar mau membunuh, saya tak ragu membunuh duluan.”*

**G**elap, hening, dan amarah menjadi teror yang sempurna malam itu. Dengung suara mesin kapal tiba-tiba berhenti. Sebanyak 17 orang yang berada di kapal itu panik. Hening, tak ada sepele kata pun terucap. Para penumpang yang berasal dari Timur Tengah itu hanya saling berpandangan nanar, cemas. Sedangkan dua orang warga negara Indonesia, satu orang sebagai nakhoda dan seorang bocah sebagai anak buah kapal (ABK) sibuk dengan pekerjaannya. Kapal yang membawa mereka, sejatinya adalah kapal



penangkap ikan tuna, terus terombang-ambing di tengah Samudra Hindia. Hari itu, 12 Oktober 2010, kapal itu sudah tiga hari lepas dari Pantai Selatan Pulau Jawa, tujuannya Pulau Christmas, Australia.

Malam baru saja turun, tetapi kondisi di tengah samudra cepat berubah menjadi gelap. Dan tiba-tiba mesin kapal mati. Andri, si ABK itu lalu turun ke ruang mesin. Ada dua mesin di depan Andri, mesin utama dan cadangan. Mesin cadangan di depannya tak bergeming, diam. Mesin itu mati setelah bekerja sekitar 20 jam. Satunya mesin utama, sudah mati sekitar sehari sebelumnya. Upaya Andri menghidupkan mesin sia-sia.

Namun alangkah kagetnya Andri, ketika sampai di atas kapal. Serombongan penumpang berkumpul di depan ruang kemudi. Salah satu dari warga Timur Tengah itu mengacung-acungkan balok kayu dan mengancam dengan bahasa Inggris yang terbatas. "Where are we? We're gonna kill you both!" ancamnya sambil mengacungkan balok kayu ke arah laut.

Andri ketakutan setengah mati. Ia sudah pasrah apakah saat itu akan menjadi akhir hidupnya atau justru ia yang akan mengakhiri hidup orang lain. Yang terlintas di pikiran bocah itu hanya bagaimana caranya bisa selamat.

"Saya selalu menyimpan golok di balik tas yang saya gunakan sebagai bantal. Kalau mereka benar-benar mau membunuh, saya tak ragu membunuh duluan," aku Andri. Di tengah teror mencekam itu, tiba-tiba lampu sorot dari berbagai penjuru ditembakkan ke kapal. Perintah diam di tempat dan angkat tangan bersahutan.

Rupanya ada patroli perairan Australia. Mereka lantas menangkap kapal Andri yang mengangkut para imigran gelap itu. Perasaan senang dan takut berbaur di hati Andri. Bocah itu, bersama nakhoda dan 16 penumpang berwajah Timur Tengah itu selamat sebelum kapal mereka tenggelam di laut. Namun di sisi lain, mereka tertangkap. Artinya, nasib buruk belum akan lepas dari bocah kelahiran Sukabumi, Jawa

Barat itu.

Saat itu, ketika ditangkap Australia, Andri sebenarnya masih belum dewasa. Meski mendapat dakwaan seram, terlibat dalam penyelundupan manusia, ia masih di bawah umur. Ia kelahiran 1995, artinya saat ditangkap pada Oktober 2010 itu, umurnya baru 15 tahun.

Namun nahas, pemerintah Australia tak mau begitu saja mengakui Andri sebagai anak di bawah umur. Pemerintah Australia melakukan pengategorian tahanan dengan menggunakan *x-ray* pergelangan tangan. Hasilnya, Andri dianggap mencukupi umur untuk ditahan sebagai orang dewasa.

Perlakuan sama juga dialami oleh Indra (bukan nama sebenarnya). Ia menjadi ABK dari jenis kapal yang sama. Penumpangnya adalah delapan imigran gelap asal Timur Tengah. Indra tertangkap oleh patroli perairan Australia pada 15 Desember 2010. Perjalanan yang ditempuhnya lebih lama dari Andri, tujuh hari. Pasalnya pada akhir tahun, angin monsun barat sedang puncak-puncaknya mendatangkan badai, beruntung kapal Indra memang berhasil selamat dari amukan badai ketika mendekati Pulau Christmas. Sekitar pukul 09.00 waktu setempat, dua kapal patroli mendekati mereka. Mereka pun hendak melarikan diri. Kondisi gelombang yang tinggi memungkinkan mereka bermanuver dengan kapal tuna berukuran sedang. Namun kelas kapal yang jauh berbeda membuat mereka tak beruntung.

"Ternyata kami sudah diimpit, satu kapal di depan ternyata tertutup tembok air," ujar Indra sambil menggaruk kepala.

Kisah Andri dan Indra hanya sekelumit dari kisah seram tentang anak-anak yang dimanfaatkan dalam penyelundupan manusia. Masih banyak bocah-bocah lainnya yang ditangkap Australia dalam kasus serupa. Saat ini, data Kementerian Luar Negeri mencatat, ada sekitar 23 anak Indonesia yang masih ditahan di Australia. Pemerintah masih terus berupaya untuk melakukan pembebasan.

■(ARY/YOG)

# Kisah Dua Bocah Indonesia di Penjara Australia

**Evi Tresnawati  
and Aryo Bhawono**

*detik E-PAPER*

*Bocah-bocah Indonesia disatukan dengan narapidana dewasa di penjara Australia. Berbulan-bulan mereka bergaul dengan pelaku kriminal di Negeri Kanguru itu. Jalan mereka meraih kebebasan sangat berliku.*

“**D**i sel itu saya bersama satu bule (orang asing berkewarganegaraan Australia, red). Badannya gede, dia memakai narkoba, kadang ganja. Nah kalau ganja saya sudah tahu bentuknya,”

Kalimat itu meluncur dari mulut Andri (bukan nama sebenarnya). Ia menganggap pertemuannya dengan bule itu menyeramkan.

Ia harus berada satu sel dengan seorang kriminal di penjara Silverwater, Sydney, Australia.

Waktu itu Andri masih berusia sekitar 16 tahun. Ia harus masuk ke jeruji besi di Australia setelah tertangkap membawa imigran asal Timur Tengah ke Pulau Christmas pada bulan Oktober 2010. Ia pun digiring menuju rumah persinggahan tahanan di pulau itu.

Perjalanan bocah yang belum genap 16 tahun, pada waktu itu, cukup berliku. Ia diwawancarai petugas imigrasi Australia berulang kali di Pulau Christmas maupun rumah detensi Imigrasi Darwin, Australia. Pengakuannya sebagai bocah di bawah usia 18 tahun tersendat di Darwin selama tiga bulan.

Pihak Australia, justru memiliki cara berbeda untuk melakukan deteksi usia. Di Darwin itulah Andri harus menjalani *scan x-ray* di pergelangan tangan dan kaki untuk memastikan usianya. Hasilnya, dia dianggap dewasa.

Maret 2011, hasil ini membawanya menuju Penjara Silverwater, Sydney. Sebuah

penjara yang didiami oleh penjahat Australia dan imigran gelap maupun ABK dewasa asal Indonesia. Persidangan usia berjalan melalui *video link* selama dia berada menetap di sana.

Proses mendapatkan kamar di penjara tak semudah yang dibayangkan. Andri harus mengalami kamar gelap sendirian selama 10 hari. Baru setelah itu ia ditempatkan di blok 11 Port 8, tempat orang-orang Indonesia.

Anehnya ia tak bisa menetap dengan tenang. Proses pemindahan diberlakukan sewaktu-waktu, antara blok 11 Port 8 ke 14. Namun Andri tetap diperlakukan sebagai orang dewasa.

Kedua blok tersebut dihuni oleh orang dewasa, dan di blok 14 inilah ia bertemu dengan bule itu. “Dia pernah menawari saya rokok, saya mau itu. Kalau narkoba saya tidak mau,” akunya.

Perlakuan dewasa ini pula yang membuka tawaran pekerjaan di dalam penjara. Andri menjahit selimut dengan upah 5 dolar Australia. Pendapatan yang lumayan di dalam penjara.

Namun tawaran pekerjaan ini tak serta-merta memudahkannya. Ia berkali-kali harus menghadapi penggeledahan yang dilakukan petugas penjara. Penggeledahan ini termasuk penelanjangan.

Bahkan olok-olokan karena alat kelaminnya berukuran kecil sering dilontarkan oleh petugas penjara. Ia hanya bisa menerima perlakuan ini.

Juli 2011, angin segar berembus ketika pengadilan memutuskan Andri belum berusia dewasa. Ia mendapatkan tiket pembebasannya. Putusan ini membawanya menuju rumah tahanan imigrasi Villawood Sydney pada Desember 2011 sebelum beranjak kembali ke tanah air.

Perlakuan sama dialami oleh Indra. Bocah sepantaran dengan Andri ini ditangkap di perairan yang sama pada Desember 2010 ketika menyelundupkan delapan imigran gelap. Hasil *scan x-ray* menunjukkan Indra berusia antara 18-19 tahun. Ia pun mengalami mutasi ke penjara Silverwater. Ia memasuki blok tertutup untuk narapidana kriminal di Darsi 1. Pemandahan pertama dilakukan selama sepekan menuju Darsi 10 yang juga ditempati oleh narapidana kriminal. Di blok inilah ia bergaul dengan narapidana kriminal dengan bekal bahasa Inggris terbatas.

Pengalaman pemindahan blok juga mempertemukannya dengan orang-orang Pakistan. Mereka bertegur sapa dengan keterbatasan bahasa. Berbahasa merupakan pengalaman yang paling diingat Indra. Ketika bercampur dengan kriminal Australia, ia hanya

mengingat umpatan-umpatan saja. "Banyak yang memaki-maki, 'fuck-fuck', gitulah," kenangnya.

Kebetulan antusiasme mereka untuk mengikuti kelas bahasa Inggris sama-sama tinggi. Sayang kemampuan bahasa Inggrisnya tak terasah karena gagal mengikuti kelas di penjara. Memang Indra cenderung memanfaatkan fasilitas penjara, seperti perpustakaan. Namun kemampuan bahasa ini membatasinya untuk membaca lebih banyak.

Pengalaman memanfaatkan fasilitas ini juga dilakukannya ketika masih berada di rumah tahanan imigrasi Darwin. Fasilitas pengembangan aktivitas dan kemampuan tersedia di sana seperti olahraga, keterampilan *airbrush* kaus, dan lainnya. "Saya bisa *airbrush* kaus, saya simpan buat kenang-kenangan. Kalau olahraga ada golf, boling, dan lainnya. Lengkap deh," ingatnya.

Pembebasan terhadap Indra sendiri dilakukan setelah sidang pencabutan tuntutan pada Desember 2011. Hakim memutuskan tuntutan itu tidak layak karena Indra masih di bawah umur. Ia dipulangkan ke Indonesia bersama dengan Andri melalui Bali. Namun Indra ternyata memberikan informasi atas keberadaan anak di bawah umur asal Indonesia yang masih berada di Australia. Ia menyebutkan dipindahkan ke Darwin dari Pulau Christmas bersama 3 orang di bawah umur. "Mereka menyebut ada 3 *baby*, nah ini berarti ada anak-anak Indonesia," jelasnya.

Memang keberadaan anak di bawah umur masih cukup banyak.

Pengacara Indra dan Andri, Lisa Hiarije menyebutkan masih sekitar 36 anak di sana. Ia khawatir bocah-bocah ini mendapatkan perlakuan orang dewasa cukup lama.

Kekhawatiran inilah yang membuatnya terus-menerus mencari informasi. Ia memprotes keras penggunaan sistem *scan x-ray* pergelangan untuk mengetahui umur mereka. Karena selama ini sistem ini banyak mengalami kesalahan. "Buktinya Andri dan Indra ini yang telah berhasil bebas walaupun *x-ray* menunjukkan bahwa keduanya dewasa. Ini yang saya sayangkan," keluhnya.

Kementerian Luar Negeri Indonesia sendiri tak menyanggah adanya anak Indonesia yang berada di balik jeruji Australia. Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan masih ada anak Indonesia yang masih ditahan di Australia. Pemerintah sendiri masih terus berupaya melakukan pembebasan.

Namun Kemenlu sudah memastikan, Pemerintah Australia juga menggunakan dokumen-dokumen mengenai usia dari para ABK di bawah umur tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan usia mereka. Dokumen yang dilihat, seperti akta kelahiran dan ijazah sekolah.

"Saya pastikan bahwa sudah ada pengakuan atas dokumen-dokumen itu. Mereka memiliki kecenderungan untuk mengategorikan sebagai anak-anak bagi mereka yang usianya abu-abu, seperti 18 atau 19 tahun," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene. ■ (ARY/YOG)



# Anak Sekecil Itu Berkelahi dengan Waktu

**Evi Tresnawati  
and Aryo Bhawono**

MAJALAH *Detik E-PAPER*

*Mereka masih anak-anak. Namun dipaksa bekerja keras. Melewatkan waktu belajar. Dibayar pas-pasan.*

**K**aki Indra berkecipak di atas genangan air dermaga Muara Angke, Jakarta. Ia menapak dengan cekatan di setiap meter titian yang licin. Sebuah tong berisi ikan dan es ia tahan dengan kedua tangannya. Berat.

Tahun 2006, ia mulai bekerja sebagai anak buah kapal jenis 'pelele', sebuah kapal ikan berukuran kecil. Waktu itu umurnya

belum juga genap 15 tahun. Namun ia sudah terdaftar sebagai anak buah kapal (ABK).

Kapal ini bermuatan 4 sampai 5 orang, sudah termasuk sang kapten. Waktu itu Indra bukan satu-satunya bocah. Ia tak kenal secara pasti rekan sesama bocahnya, hanya saja salah seorang rekannya berumur sekitar 13 tahun.

Kapal yang ditumpangnya memang berbeda dengan kapal reguler. Kapal ini berukuran lebih sedang, dengan panjang 17 meter. Kargo maksimal pun terbatas, sekitar 15 ton. Kapal ini melayani muatan ikan dari Sumatera ke Jakarta. "Tugas saya mengangkut tong ikan sama es. Isi gentongnya dimasukkan ke peti lalu diderek pakai tangan," ujarnya. Keberadaan Indra memang bisa digolongkan melanggar hukum. Pasalnya selaku ABK, ia sudah mengerjakan pekerjaan berat untuk anak-anak. Ia mengangkut

beban puluhan kilogram dengan tenaganya sendiri ke dalam kapal.

Dunia pelayaran ternyata memang menyimpan pemanfaatan pekerja di bawah umur. Tak hanya untuk kapal kargo, kapal nelayan pun memanfaatkan tenaga di bawah umur. Indra sendiri bisa melewati aturan baku dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Memang terdapat kondisi-kondisi khusus untuk mempekerjakan anak, tetapi pelanggaran ini berlaku baku pada kondisi kerja terburuk. Kondisi terburuk tersebut antara lain perbudakan atau praktik serupa perbudakan, prostitusi anak, dan menggunakan anak dalam kegiatan terlarang.

Penelusuran yang dilakukan majalah *detik* menunjukkan praktik pekerja anak di bidang pelayaran sangat terselubung. Praktik ini biasanya dilakukan dalam bentuk pelayaran-pelayaran kecil.

Salah satu anak buah



pemilik kapal yang berbasis di Muara Angke, Sahroni, menyebutkan persyaratan ABK memang longgar. Pemilik kapal tak memandang usia, siapapun yang memiliki syarat bisa berenang diperbolehkan untuk turut bekerja. Gaji yang ditawarkan memang pas-pasan, yakni Rp 500 ribu untuk sekali jalan. Perjalanan ini ditempuh dalam waktu 3 sampai 4 hari. Tak jarang bocah-bocah pun menerima tawaran ini.

“Ya, kerjaan mereka mengangkut barang. Kalau saya biasa di mesin,” jelasnya.

Padahal, di Muara Angke terdapat puluhan kapal kecil semacam ini. Pemanfaatan pekerja anak ini bukan karena upah murah. Mereka mendapat porsi upah yang sama dengan pekerja dewasa. Namun beban pekerjaan mereka juga sama. Pemanfaatan anak di bawah umur dalam kapal ikan ini untuk mengisi pekerjaan yang tidak membutuhkan kemampuan khusus. Namun rata-rata anak yang bekerja di sana kemudian mempelajari teknik mengendalikan kapal.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menemukan praktik pemanfaatan pekerja anak dalam pelayaran ini yang terjadi tak hanya di kargo. Anak-anak nelayan di Rote, Nusa Tenggara Timur, tak luput dari pemanfaatan pekerja anak. Hanya saja pemanfaatan ini tak seburuk yang terjadi di Muara Angke. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mendapatkan pendataan anak-anak nelayan yang bekerja di dapur kapal kargo maupun imigran. Pekerjaan dapur ini tidak berat,

namun memangkas waktu mereka belajar.

“Data ini kami dapatkan dari romo (pastor) di sana. Biasanya musiman, ketika ikan sedikit dan nelayan tidak melaut,” jelasnya.

Pengakuan adanya pekerja anak di bidang pelayaran perikanan ini merupakan celah pada pekerja anak dalam kondisi buruk. Padahal data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menunjukkan jumlah pekerja anak di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2010 lalu.



Survei mereka pada tahun itu menunjukkan pekerja anak di Indonesia mencapai 1,5 juta. Pada tahun sebelumnya, pekerja anak antara 10-17 tahun di Indonesia mencapai 1,8 juta. Jadi terjadi penurunan sekitar 4,3%.

Catatan Kementerian Tenaga Kerja berupaya melakukan penarikan jumlah tenaga kerja anak. Tahun 2012 ini mereka telah melakukan penarikan tenaga kerja anak sebanyak 10.750 anak.

Kementerian Perhubungan memastikan ABK memiliki persyaratan yang ketat. ABK harus memiliki sertifikasi keselamatan.

Sehingga perekrutan ABK anak susah dilakukan.

Namun pengawasan kapal ikan ini sulit dilakukan. Kapal model pelele merupakan kapal kecil. Kementerian Perhubungan mengategorikan kapal ini di bawah pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kapal pelele digolongkan sebagai kapal perikanan.

“Nah, kalau kapal kecil jenis ini pengawasan ABK-nya juga di KKP. Mereka keluar-masuk melalui syahbandar perikanan,” jelasnya.

KKP sendiri menyatakan pengawasan lebih intens dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. KKP lebih menitikberatkan pengawasan isi muatan berupa ikan. Kapuskom KKP Indra Sakti menyebutkan selama ini pencocokkan dokumen awak kapal tetap dilakukan, namun sejauh ini tidak ada temuan berupa ABK anak.

“Nah, dokumen itu berlipis, harusnya Kementerian Perhubungan yang melakukan pengawasan soal itu,” ungkapnya. ■ (ARY/YOG)

# Kisah Pilu Buruh Anak Di Wiyaha Domestik

**Adhitya Himawan**

*Majalah Media Pembaruan*

*Rumah sederhana yang terletak di Jalan Sagu Gang Gajen No 52 Jagakarsa, Jakarta Selatan terdengar ramai dengan canda dan gelak tawa para gadis remaja.*

**P**ara gadis remaja yang ternyata Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) tersebut terlihat sedang sibuk di dapur. Ketika Media Pembaruan tiba di rumah yang bertuliskan LPK Mitra Utama tersebut, hawa sejuk dan kicauan burung dalam sangkar riuh menyambut. LPK Mitra Utama adalah lembaga rekrutmen, pelatihan, dan penyalur jasa PRT dan babysitter.

“Silahkan masuk Mas,” ujar pria berambut gondrong sambil mempersilakan Media Pembaruan duduk. Tak lama kemudian, pria bernama Mashudi, Ketua Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI) datang sambil membawakan teh botol. Sambil menikmati teh botol dingin, Media Pembaruan langsung terlibat perbincangan dengan Siti Lestari (17), salah satu PRTA, Jumat, (21/9), dalam suasana santai.

Siti menceritakan suka dukanya. “Saya memang ada disini terus, karena nggak mau balik lagi ke rumah majikan di Ancol, mas. Kemarin lebaran saya izin mau pulang. Terus, kalau saya balik ke rumah majikan, tahun depan kalau lebaran Siti nggak boleh pulang ke rumah. Jadi Siti nggak mau kerja disitu lagi,” ujar Siti dengan raut wajah muram. Siti kemudian bercerita selama bekerja 6 bulan di rumah majikan yang terletak di Ancol,

Jakarta Utara, ia hampir tidak pernah mendapat kebebasan sedikitpun. “Saya nggak pernah diizinkan keluar jalan-jalan sebentar. Kata majikan, khawatir nanti saya kena hipnotis. Bahkan keluar sebentar buat ngobrol sama pembantu tetangga, saya juga nggak pernah,” jawab gadis remaja asal Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Seperti halnya banyak cerita anak remaja yang terjun menjadi PRTA, alasan kemiskinan pulalah yang membuat Siti melakoni jadi PRTA. “Siti kepingin bantu orang tua. Orang tua Siti kerja jadi petani. Tanah sawah di kampung bukan milik bapak Siti. Itu milik orang lain. Dikerjain sama bapak. Kalau panen, baru dibagi,” jawab Siti menjelaskan latar belakang keluarganya yang hidup dalam kemiskinan. Kondisi inilah yang mendorong tekadnya untuk terjun menjadi PRTA.

Sayangnya dengan gaji hanya 700.000 perbulan, tak

banyak bantuan yang bisa diberikan Siti kepada kedua orang tuanya. Tragisnya lagi, gaji 700.000 perbulan itu tak pernah diberikan secara utuh setiap bulan. "Waktu bulan pertama bekerja, dari 700.000, Siti hanya menerima Rp 300.000. Sebesar Rp 400.000 diambil oleh Yayasan Mitra Amanda. Katanya yang dua ratus ribu buat yang bawa aku. Seratus buat yang jemput aku. Terus seratus lagi nggak tahu, pokoknya Siti disuruh tanda tangan. Bulan selanjutnya Rp 400.000 buat aku, tapi dipegang majikan. Tiap bulan kalau minta, dikasih Rp 200.000. Baru kalau mau pulang mudik yang Rp 400.000 dikasih,"jawab Siti panjang lebar.

Lain lagi cerita Siti dengan Khusnul Khotimah (17), PRTA asal Purworejo, Jawa Tengah. Gadis remaja yang biasa dipanggil Ima ini bekerja dengan majikan yang masih saudara jauh ibunya. Bisa dibbilang nasib Ima sedikit lebih baik dari Siti. Gaji yang ia terima per bulan lebih besar, satu juta rupiah. "Lumayan yang saya dapat sih kak. Uang bulanan saya dapat, harian juga dapat. Bulanan aku dapat Rp 400.000, terus harian aku dapat Rp 20.000 perhari,"jelas Ima kepada Media Pembaruan, Minggu, (23/9) di Kranji, Bekasi.

Sayang, seperti halnya Siti, boleh dibbilang Ima juga jarang menerima gajinya utuh setiap bulan. Sebetulnya pinginnya dapat lebih sih, Kak. Tapi sekarang adanya ya segitu. Tapi uang yang bulanan Rp 400.000 *nggak* diambil Kak. Kata majikan ntar, kalau sudah butuh, gitu. Jadi bulanan yang Rp 400.000 dipegang sama bapak.

Ima dikasih yang Rp 20.000 tiap hari. Jadi kalau butuh, nanti baru dikasih,"tutur Ima dengan kecewa.

Ima mengaku baru bisa mengambil gajinya yang bulanan jika ia hendak mengirim uang ke orang tuanya. Itupun tidak bisa ia lakukan setiap bulan. Ima hanya bisa mengirim uang jika ada keluarga majikan yang datang dari kampung (kebetulan Ima dan Majikan berasal dari desa yang sama di Purworejo).

Latar belakang Ima terdampar melakoni peran PRTA juga tidak berbeda dengan Siti. Kemiskinan pulalah yang memaksanya mengubur impian menjadi seorang. "Sebetulnya Ima kepengin jadi guru SD. Tapi pas lulus (SMP,red) kan memang nggak ada biaya. Orang tua pendapatannya cuma petani, nggak seberapa gitu. Mikir-mikir, lebih baik saya nyari (baca : uang),"jawab Ima sambil menghela nafas panjang.

Untunglah Ima bukan gadis yang cepat menyerah. Sambil bekerja, dirinya sekarang sedang menyelesaikan Paket C di PKBM Bekasi. Sayang biaya kuliah yang tinggi membuat Ima tak berani melanjutkan mimpinya menjadi seorang guru. "Ima sebetulnya juga kepingin kuliah, tapi itu kan butuh biaya kak. Kerja cuma segini, kalau kuliah kan mahal. Jadi akhirnya nggak mikir sampai kesitu kak,"jawab Ima dengan tandas.

Tatkala di sekitar rumah majikannya muncul Sanggar Jahit khusus PRTA, Ima segera meminta izin majikannya mengikuti kursus menjahit. Gayung bersambut, majikannya ternyata juga mendorong dirinya agar

suatu saat bisa membuka usaha sendiri. Kalau kata bapak (baca : majikan pria,red) daripada jadi guru, mending buka usaha. Kalau udah punya modal mending buka usaha. Terus ada ILO, jadi ikut jahit ILO disini. Suatu hari nanti, Ima pinginnya buka batik, gitu,"pungkas Ima menjelaskan sambil tersipu malu. Sanggar kursus jahit bagi PRTA yang diikuti Ima memang adalah hasil kerjasama pemilik sanggar, Ibu Napsiah dengan Yayasan Mitra ImaDei dan ILO.

Kemiskinan yang masih menjadi problem serius di Indonesia, harus diakui akan membuat Siti-Siti dan Ima-Ima baru terus bermunculan di kemudian hari. Kenyataan ini diakui oleh Mashudi, Ketua APPSI. Pria berkaus hitam dan berambut pirang ini berkata dengan yakin kepada Media Pembaruan bahwa fenomena PRT anak usia 15-18 tahun akan sulit untuk dihilangkan sampai kapanpun. Menurut Mashudi, kondisi ini disebabkan potensi ekonomi dari pempekerjakan PRT anak sungguh besar. "Potensi ekonomi dari PRT anak sebesar 30 % itu banyak mas. Tidak sedikit. Jadi potensi 30% PRT anak dari total PRT itu banyak, mas," lanjut Mashudi sambil meletakkan kedua tangannya diatas meja.

Selain itu, ia menambahkan, faktor kemiskinan juga menjadi kendala utama kenapa banyak gadis remaja yang akhirnya terjun menjadi PRT ketimbang melanjutkan ke SMA. "Kalau mereka disuruh harus sekolah lagi, siapa yang harus menanggung biaya sekolah? Itu saja sebenarnya. Kita tahu kondisi itu

memang bisa masuk ke bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kita tahu itu. Makanya kita menitipkan ke pengguna jasa yang sudah kita kenal, kita sudah tahu jenis pekerjaannya seperti apa. Anak dibawah 18 tahun dan diatas 15 tahun tidak boleh mengasuh bayi, tidak memasak. Jadi mereka hanya bersih-bersih dan mencuci. Jadi kriteria pekerjaan sudah kita jelaskan kepada pengguna kerja,"urai Mashudi sambil duduk bersandar di kursi.

Selain masih banyaknya anak remaja yang menjadi PRTA juga tak lepas dari aturan hukum yang rancu. "Kita juga mengalami kesulitan harus berpatokan pada UU mana. Apakah pekerja rumah tangga bisa dikategorikan masuk di UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kalau masuk di UU itu, mestinya semua masuk kesitu. Tapi pihak-pihak agen mengambil pasal per pasal. Jadi

pasal umur dikaitkan. Tapi pasal yang lain tidak ada. Padahal di Konvensi ILO Nomor : 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja yang kini telah diratifikasi menjadi UU No 20 Tahun 1999, itu jelas dikatakan batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Itu jelas UU-nya. Nah di UU UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, anak usia lebih dari 15 tahun tapi dibawah 18 tahun boleh bekerja. Padahal di UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jelas yang dimaksud anak adalah yang berusia dibawah 18 tahun. Jadi UU itu menurut saya memang tumpang tindih,"urai Mashudi panjang lebar menjelaskan kebingungannya.

Sebagai jalan keluar, Mashudi beserta seluruh lembaga penyalur jasa PRT yang tergabung dalam APPSI membuat kebijakan khusus terkait PRTA. "Biasanya kita

menempatkan mereka di pengguna jasa yang sudah kita kenal, itu satu. Kedua, kriteria pekerjaan harus jelas. Anak dibawah 18 tahun dan diatas 15 tahun tidak boleh mengasuh bayi, tidak memasak. Jadi mereka hanya bersih-bersih dan mencuci. Jadi kriteria pekerjaan sudah kita jelaskan kepada pengguna kerja. Alasannya, kalau mengasuh anak, itu beresiko. Mereka *kan* masih anak-anak, masih labil sehingga kita tidak mau mengambil resiko dari itu. Kalau soal memasak, ya karena dia belum bisa memasak, dia belum pandai memasak. Jadi pengguna jasa mungkin tidak diuntungkan jika mereka disuruh memasak," tandas Mashudi di akhir perbincangan.

Kalau sudah begini, sudah waktunya memang pemerintah dan DPR segera mengesahkan UU PRT untuk memberi kepastian nasib dan perlindungan bagi PRT maupun PRTA. ■







## Mewujudkan Mimpi PRTA Melalui Sanggar Jahit

**Adhitya Himawan**

*Majalah Media Pembaruan*

Suasana “Sanggar Belajar Masa Depan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) Kranji” yang terletak Jalan Banteng No 18. RT/RW 01/11 Kranji, Bekasi Barat nampak riuh dengan canda tawa. Beberapa ibu dan para gadis remaja nampak duduk dengan santai dan sambil mengobrol. Di meja yang mereka hadapi tergeletak dua buah baki yang berbentuk bundar dan persegi panjang. Rupanya para gadis remaja tersebut adalah Pekerja Rumah Tangga Anak yang sedang belajar menyusun bros.

“Di sanggar ini mereka memang belajar untuk menjahit, bikin payet, bikin bros dan lain-lain. Program ini sudah kami mulai sejak tahun 2009 dan bekerja sama dengan ILO. Awalnya dulu di Harapan Mulia, tetapi karena tidak mencapai target PRTA, akhirnya kami pindahkan ke Kranji,” jelas Inke Maris Purba, aktivis LSM Mitra ImaDei kepada *Media Pembaruan*, Minggu, (23/9).

Inke beralasan Mitra ImaDei memilih program kursus keterampilan menjahit karena program ini membuka prospek masa depan yang lebih baik

bagi PRTA. “Pada umumnya anak-anak memilih menjahit. Karena kedepannya mereka ingin membuka usaha jahit sendiri. Dari segi modal juga tidak terlalu besar, dan lebih mudah bagi mereka. Kalau kita kejar mereka untuk bersekolah, kadang-kadang mereka sendiri sudah tidak berminat untuk sekolah,” jawab Inke sambil tersenyum simpul.

Setelah pindah ke Kranji, program kursus menjahit bagi PRT Anak yang mulai berjalan sejak 2011 sempat berjalan dengan dana swadaya dari Mitra ImaDei sendiri. Untunglah, Mitra ImaDei berhasil mengajak salah seorang warga bernama Bu Napsiah untuk meminjam tempat miliknya.

“Ayo keluarkan buku tulis kalian. Nanti pas nulis, ukuran di buku ini jangan ditulis, tapi pakai ukuran badan kamu sendiri. Ini cuma contoh. Jadi bajunya nanti kamu pakai masing-masing,” ujar Bu Napsiah kepada para PRTA untuk mengeluarkan buku tulisnya. Sambil mengajak, Napsiah menjelaskan proses kursus dengan ramah kepada Media Pembaruan. “Pertama belajar menjahit dulu. Kalau bikin bros itu cuma selingan saja, biar anaknya nggak bosan. Kadang sih bikin payet juga, lalu belajar sulam pita,” kata Bu Napsiah sambil mengawasi para PRTA belajar menjahit. Bu Napsiah yakin sanggar jahit yang ia dirikan akan bisa memenuhi kebutuhan PRTA. “Kalau jahit itu kan hasilnya ada terus sampai tua. Diparantin (dihampiri, red) uang,” kata Bu

Napsiah dengan penuh harap.

Bu Napsiah memang mengalokasikan waktu khusus hari minggu untuk mengajar keterampilan menjahit bagi PRTA anak. Di hari kerja, ia dan karyawannya berjumlah lima orang menjalankan bisnis jahit seperti biasa.

Bu Napsiah bercerita awalnya ia mendapat tawaran kerjasama dari Mitra ImaDei dan ILO. "Waktu itu dari Kecamatan dating, kita dikontrak ILO dan diberi dana oleh Mitra ImaDei. Saya berusaha keras agar sanggar jahit ini mencapai target 50 PRTA. Saya kemudian ke RW-RW, lalu ke Kelurahan. Jadi saya sosialisasi terus," kata Bu Napsiah sambil menyeka keringat di keningnya. Saat ini, dari peserta lama, jumlah PRTA yang berhasil diajak ikut kursus menjahit sudah sekitar 17 orang. Pengamatan *Media Pembaruan*, proses belajar berlangsung dengan agak lambat. Maklum saja, beberapa diantaranya baru saja pertama kali mengikuti kursus menjahit.

Sepanjang hari dari siang hingga sore, para PRTA itu memang nampak bersemangat belajar menjahit. Mereka menyadari, kursus menjahit adalah salah satu jalan bagi mereka supaya bisa keluar dari kemiskinan. Seperti yang dituturkan Khusnul Khotimah (17) kepada *Media Pembaruan*. PRTA asal Purworejo, Jawa Tengah ini berharap dirinya tidak akan selamanya jadi PRT. "Cita-cita sih pingin jadi guru. Kalau sekolah lagi dan kuliah, perlu biaya kak. Apalagi kata bapak, lebih baik buka usaha daripada jadi guru. Makanya Ima ikut kursus menjahit ini," ujar gadis

remaja yang akrab dipanggil Ima kepada *Media Pembaruan* sambil tersenyum malu-malu.

Upaya yang dilakukan Mitra ImaDei rupanya juga dilakukan oleh Jala PRT. Jala PRT adalah jaringan advokasi yang berbasis nasional dan terbentuk pada 11 Juli 2004. Jala PRT terdiri dari 26 lembaga swadaya masyarakat dan individu - individu yang peduli terhadap perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Salah satu langkah nyata yang pernah dilakukan Jala PRT adalah menggelar Sekolah Alternatif PRT Rumpun di Yogyakarta. "Program ini berlangsung dari periode Juli 2003 hingga Februari 2006. Saat ini sudah berjalan 8 Angkatan Belajar. Jumlah total peserta 267 peserta dengan rata - rata peserta perangkatan 15 sampai 30 orang. Mayoritas adalah tamatan SMP, jadi sebagian anak-anak," jelas Lita Angraini, Koordinator Jala PRT kepada *Media Pembaruan*, Sabtu, (13/10).

Macam-macam yang bisa dipelajari oleh para PRT maupun PRTA dalam Sekolah Alternatif PRT Rumpun. Pelajaran yang diberikan meliputi kategori keahlian umum seperti mengemudi, bahasa Inggris, komputer, P3K, hingga manajemen kerumahtanggaan. Ditambah lagi dengan materi pilihan seperti teater, musik, dan olah tubuh. Uniknya, juga ada materi kejuruan yang terdiri dari kerumahtanggaan, home based nursing dan baby sitter.

Namun yang paling patut diaurangi jempol, tidak hanya materi terkait kebutuhan praktis

seperti keterampilan saja yang diajarkan di Sekolah Alternatif PRT Rumpun. Tetapi juga materi yang menumbuhkan kesadaran diri bahwa PRT sebagaimana manusia yang lain memiliki hak asasi untuk mendapat pengakuan dan perlindungan. Materi tersebut antara adil gender : PRT sebagai perempuan, pekerjamarga negara, dan warga dunia. Ditambah materi anak ; hak dan kesehatan reproduksi. Ditambah lagi materi advokasi litigasi dan non litigasi, advokasi kebijakan dan kampanye pengorganisasian.

Lita mengaku puas dengan pencapaian Sekolah Alternatif PRT Rumpun. "Output Sekolah PRT dengan perjanjian kerja dan standar perlindungannya dinilai oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi DIY, dan Pemerintah Kota Jogjakarta, bisa menjadi contoh praktek hubungan kerja majikan dengan PRT yang bisa membuat perbaikan situasi PRT Perempuan, khususnya di DIY," kata Lita.

Melihat kiprah Sanggar Jahit PRTA maupun Sekolah PRT Rumpun, kita pantas bersyukur ditengah ketidakpastian PRTA, masih ada pihak-pihak yang peduli terhadap masa depan PRTA. Bagaimanapun juga, terpaan kemiskinan tidak boleh sampai melenyapkan semangat hidup para gadis remaja yang menjadi PRTA untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mungkin sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian dan bantuan bagi usaha kecil seperti milik Bu Napsiah ataupun sekolah alternatif untuk PRTA supaya semakin berkembang. ■



## Majikan Pemberi Secercah Harapan Bagi PRT Anak

**D**i antara kaum pekerja, persoalan pekerja anak yang bekerja di sektor domestik dengan menjadi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) termasuk jarang muncul di ranah publik. Berbeda dengan buruh pabrik yang seringkali mendapat sorotan media massa ketika melakukan aksi demonstrasi, pemberitaan terhadap PRTA termasuk jarang muncul meskipun bukan tidak ada sama sekali.

Di Indonesia, umumnya

anak perempuan mulai melakukan pekerjaan rumah tangga sejak usia antara dua belas dan lima belas tahun. Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah lima belas tahun. Anak-anak perempuan ini direkrut oleh para calon majikan, teman, kerabat, atau agen tenaga kerja dari daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah miskin untuk menjadi pekerja rumah tangga di pusat-pusat kota. Calon majikan lebih suka mempekerjakan

anak-anak karena mereka lebih murah daripada orang dewasa, lebih mudah diatur, dan “tidak dapat melarikan diri dari majikan mereka”.

Kenyataan diatas diakui oleh Mashudi, Ketua Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI). “Faktor majikan memilih PRT anak karena anak itu belum mengenal Jakarta, mudah dikendalikan. Gajinya relatif lebih murah, meskipun nggak beda jauh. Hanya beda 100 sampai 200 ribu. Kalau dulu memang ada jarak lebar. Nah sekarang permintaan terhadap PRT anak nggak sebanyak dulu,” jawab Mashudi kepada *Media Pembaruan*, Jumat, (21/9) di Kantor LPK Mitra Utama.

Mashudi menyebut akhir-akhir ini terjadi pergeseran dengan lebih banyak permintaan PRT berpengalaman. “Kalau dulu memang mencari PRT yang murah. Karena sekarang gaji PRT anak dengan PRT berpengalaman hampir sejajar. Jadi PRT anak itu bisa 800 ribu, gaji PRT berpengalaman itu mencapai Rp 900.000 sampai Rp 1 juta. Memang kita tinggikan. Walaupun ada permintaan PRT anak karena memang dia lebih suka PRT anak,” imbuh Mashudi.

Pandangan berbeda datang dari Maria Yohanista Djou, Ketua Dewan Pengurus Mitra ImaDei. Maria melihat adanya kecenderungan makin banyak remaja perempuan yang memilih bekerja di pabrik ketimbang menjadi PRTA. “Saya meragukan

kalau dibilang semakin banyak PRT anak. Kita mencari lokasi yang tadi kita kira banyak PRT anak, ternyata susah juga dapatnya. Kita harus buktikan sama data. Banyak lokasi yang kita datangi, ternyata usia mereka sudah 18 tahun. Banyak dari mereka yang nggak mau jadi PRT, mereka maunya ke pabrik. Menemukan PRT anak, yang kami alami di lapangan, itu tidak gampang. Kadang dia jadi PRT untuk jumpang, begitu ada peluang pindah ke pabrik, pindah dia," kata Maria kepada *Media Pembaruan*, (11/9), di Jakarta.

Kalau pendapat Mashudi dan Maria memang benar, kenyataan ini pantas disyukuri. Maklum saja, pekerja rumah tangga di Indonesia selama ini tidak dianggap sebagai pekerja. Akibatnya mereka tidak terjangkau oleh perlindungan hukum ketenagakerjaan nasional

yang menjamin hak-hak dasar di bidang ketenagakerjaan seperti upah minimum, upah lembur, jumlah jam kerja maksimal yang diperbolehkan hingga jaminan sosial. Kondisi inilah yang membuat PRT disebut sebagai kaum pekerja yang paling lemah posisinya. Celakanya lagi, berdasarkan data International Labor Organization (ILO), saat ini ada 2,6 juta pekerja rumah tangga di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 688.132, sebagian besar adalah anak-anak perempuan di bawah usia delapan belas tahun atau PRTA.

Untunglah, ditengah tidak pastinya nasib PRT termasuk PRTA, masih ada segelintir majikan yang memiliki kesadaran untuk memberdayakan PRTA-nya. Misalkan saja yang ditemui *Media Pembaruan* di Sanggar Belajar Masa Depan Pekerja Rumah

Tangga Anak (PRTA) Kranji. Ketika *Media Pembaruan* berkunjung, Minggu, (23/9), beberapa PRTA bahkan ada yang diantar sendiri oleh majikannya. Hal inilah yang dilakukan oleh Lina Marlina (38). Wanita yang sehari-hari bekerja menyablon kaus di salah satu pabrik di Bekasi ini mengantar pembantunya, Rosita (18), untuk belajar menjahit.

"Baru kemarin saya mengantar Rosita. Soalnya saya sendiri juga baru tahu," kata Lina kepada *Media Pembaruan* dengan malu-malu. Lina berharap dengan ikut kursus menjahit, suatu hari nanti Rosita bisa mandiri ketika sudah tidak bekerja padanya lagi. "Nggak selalu jadi pembantu. Jadi saya yang ngajak dia supaya maju. Tadinya kalau nggak saya omongin dia nggak tahu. Gimana juga namanya orang cuma tamat SD. Nanti kalau dia sudah maju





dengan usaha jahitnya, kalau dia pingin sekolah lagi kan bisa pake duit dari usaha jahitnya,” kata Lina.

Lina mengaku dirinya memiliki perhatian lebih mengingat Rosita masih ada hubungan saudara dengan dirinya. “Orang ini sih, dia masih saudara. Dia anak sepupu saya, bapaknya sepupu saya. Jadi sejak tahun 2001 sudah ikut saya. Rumah dia kan jauh di Tangerang, pedalaman banget, “jelas Lina dengan lirih.



Harapan senada juga datang dari Siti Wahyono (68). Nenek majikan ini juga ikut mengantar sendiri PRTA yang bekerja di rumahnya. Nenek yang ternyata istri dari pensiunan PNS Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini juga berharap agar PRTA yang bekerja di tetangga rumahnya bisa maju. “Saya tahu waktu ngurus PAUD di RW. Bu Napsiah datang, terus dia mengeluarkan brosur sanggar jahit untuk PRTA. Saya pikir program ini kok bagus ya. Saya kemudian mengajak Hayati dan

Suheti, PRTA di rumah tetangga saya untuk saya ajak. Saya bilangin majikan mereka, masak anak-anak ini mau begitu terus. Suatu saat kan mereka harus kawin. Mereka kan harus punya bekal. Akhirnya majikan itu bilang boleh, apalagi kursus ini gratis,” ujar Nenek Wahyono dengan bersemangat.

Di tengah lemahnya perlindungan negara terhadap PRTA, rasa sayang dan perhatian dari majikan terhadap masa depan

diam, dengan temannya sendiri nggak percaya diri. Dia tidak bisa mengekspresikan perasaan. Karena mereka terbiasa tidak bicara, hanya diam, disuruh-suruh. Mereka selalu menempatkan posisi mereka di bawah anak-anak lain,” sesal Maria.

Namun harus diakui, mengatasi persoalan PRTA tidak bisa semata mengandalkan kebaikan majikan saja. Perlu ada sistem hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap PRT. Termasuk PRTA. Inilah mengapa UU PRT terus dinanti kemunculannya. Maria menjelaskan bahwa dalam rapat pembahasan RUU PRT di Komisi IX, ia sudah mengusulkan perlu adanya aturan masa transisi 5 tahun untuk menghapuskan praktik PRTA. “Artinya kalau sekarang sudah bekerja, ya sudah. Karena kalau memang dia di-kembalikan ke keluarganya, keluarganya nggak bisa mengakomodasikan kehidupan dia. Di pembahasan Komisi IX DPR RI sendiri sempat muncul wacana masa transisi PRTA 20 tahun saja. Pengaturam masa transisi memang tidak mungkin langsung dilaksanakan saat ini juga. Itu utopia. Perlu ada masa transisi terlebih dahulu. Tapi dengan adanya masa transisi itu, masih bisa ada anak baru yang direkrut lagi. Setelah selesai masa transisi, jangan ada rekrutmen PRT anak lagi,” jelas Maria dengan bersemangat.

Ayo tunggu apa lagi para wakil rakyat?! Segera sahkan UU PRT! ■

# The True Sole of Indonesia's Child Laborers

**Grace Susetyo**

Jakarta GLOBE

**Fans of the classic Brothers Grimm fairy tales may remember the story of "The Elves and the Shoemaker."**

It was the tale of a humble shoemaker and his wife who struggled with business until mysterious elves came to help in the middle of the night. The elves made fancy shoes and the couple became the richest shoemakers in the country.

And while the story is more than 200 years old, it still rings true, especially when looking at today's fashion industry.

Flip through a magazine, watch a fashion show or stroll through a mall and you will

probably see the latest collection of fancy shoes, venerated as objects of envy, even status symbols. Some fashionistas say, "there's no such thing as too many shoes."

While most of us have at least a few pairs of shoes in our closets, how often do we actually think about who made them? Renowned brands and famed designers come to mind, and we assume there's big money for everyone in the business. To many people, it seems shoes simply appear in shops for us to purchase and take home — they might as well be made by elves.

In the not-so-faraway land of West Java is a backyard of Southeast Asia's fashion industry where elves are indeed at work. Only they're not the fairy-dusted kind that disappear with the moonbeams at daybreak. They're

called child laborers. And their lives are definitely no fairy tale.

## Learning the family trade

In a beautiful village in the outskirts of Bogor lives Demung, a 14-year-old shoemaker who has been in the trade for three years. Demung dropped out of 4th grade five years ago for "economic reasons." In a barely furnished, unplastered two-bedroom house with no running water, Demung lives with his parents, grandparents, 20-year-old uncle, two teenage aunts and 11-year-old sister. Demung's father, grandfather and uncle are shoemakers, too. His mother and grandmother are domestic helpers, and his 17-year-old aunt is a factory laborer.

Demung's sister, Erna, is in 5th grade. Most children in their community drop out around



this age, but Demung hopes that Erna will finish high school. The teenager initially said he had no desire to go back to school, but later admitted, “I would have loved to continue my studies if my family could afford it. But since it’s been too long, I’d better do my job well so that I can someday help put my sister through school.”

At 8 a.m. on any Monday morning, Demung and his father make their kilometer-long walk to their boss’s workshop. It would be the start to a six-day work week of 54 to 100 hours. The father-son team make 10 to 20 pairs of shoes per day.

### **A hazardous environment**

Entering the workshop, the atmosphere is actually friendly. Yuli, the owner, inherited the workshop from his father and has worked as a shoemaker since childhood before making his way to become a trusted supplier for a well known Southeast Asian fashion brand and a famous Indonesian designer. Yuli and his employees seem to get along well. His wife was serving the employees coffee.

Despite the likable human dynamics, the strong scents of glue, gasoline and other chemicals are hard to ignore — and this workshop ranks among the better-ventilated ones. Still, it’s hard to imagine how anyone could spend every day inhaling these chemicals to make a living.

“I used to get headaches when I entered a workshop,” said Demung, recalling his first days as a shoemaker at age 11. “Masks should be worn in a workshop, but they’re hardly available here. Even then, I’d have to buy them with my own money.”

The spinning sewing machine is the workshop’s constant soundtrack. The sharp tools of shoemaking — hammers, nails and sculpting knives — are definitely not suitable for children to use.

“I once got injured while sculpting the sole of a shoe. I cut myself. I was treated with iodine. It took a week to heal, and I kept working in the meantime,” Demung said.

Footwear workshops are usually the busiest around Ramadan, because many people want new shoes for Idul Fitri. During this time, Demung often works until 10 p.m. and sometimes until 2 a.m. In August, Demung spent the holidays sick in bed from being overworked.

### **A neglected cause**

Child labor exists because communities don’t think it’s a serious problem and there is demand in the market.

“Consumers don’t think about whether their shoes are made by children,” Demung said. “All they care about is that the shoes are of good quality and affordable. Whether the minors who make them can go to school or have to give that up for work, that’s the government’s problem.”

Some consumers are even amused when posed with the idea that their shoes might be made by children.

“What a clever child! Now I want to learn how to make my own shoes,” laughed Dhea, a mall shopper. “But maybe it’s just the way it is. Those who can’t afford to go to school can get into the

shoemaking business. Isn't it good for them, to become independent at an early age?"

The International Labour Organization differentiates the "child laborer" from the "working child." In developed countries, many high school students earn pocket money by working part time in supermarkets or restaurants. The child laborer, in contrast, is a minor who spends more than four hours a day at work — or any time at all doing hazardous work — and has to give up education, rest and recreation.

Most village officials in Ciomas admit that they have teenagers at school who "help their parents" run a footwear workshop, but balk when asked to be introduced to an individual. None of the villages surveyed have data on child labor in their famous footwear industry because shoemaking is considered informal work.

Even the ILO's latest data is from 2006, the year it finished a child labor eradication project in Ciomas. The ILO concluded that there was a "negligible" number of minors working in the footwear industry.

The truth is, while child laborers only make up a minority of shoemakers in Ciomas, they are still common among financially struggling families.

Asked why he employs a child laborer, Yuli said: "Not a child, but a teenager. Most start by observing shoemaking friends. One friend attends school, the other works. The teenager compares and becomes interested in shoemaking."

At the end of the week, Demung and his father, Odi, take home a joint wage of Rp 150,000

(\$15). If Rp 150,000 is the price of one pair of shoes, and Demung and Odi make 60 pairs a week, then they only take home less than 2 percent of the money made in the supply chain — a conservative estimate.

Odi said that he's proud to have his hard-working son follow in his footsteps. Demung's mother Susi, though, had something else to say. "I look at other children his age and think, he should be in school. I'm sorry to see him work with his father, leaving early in the morning, coming home at 10 p.m. or 2 a.m.," she said, choking back tears. "Someday, Demung wants to build a house. He wants to provide for his sister's, and later, his future children's education."

### Happily ever after?

Most people assume that education is the solution to child labor. After all, school children from affluent families don't become child laborers like Demung.

However, many neighbors in the community complained that even if school tuition fees were free, surprise expenses such as books and uniforms are still troublesome. Demung and his parents' total monthly wages amount to Rp 900,000 per month, most of which they spend on rice. Even protein and vegetables are luxuries on such an income, let alone an education.

"If the government made school compulsory for kids my age, I think that would make my family suffer. Who would help us make ends meet if I didn't work? And would it be possible for this 14-year-old



to go back to elementary school?" Demung said.

Achmad Marzuki, executive director of the Network of Indonesian Child Labor NGOs (Jarak), said the reasons why children in Ciomas drop out of school has little to do with tuition fees. Rather, it was because the national education system accommodated neither the needs of working children, nor the more immediate financial needs of the family.

In order to break the vicious cycle of poverty and exploitation that traps child laborers, schools in Ciomas need to prepare the youth for the local job market, but in a way that they could someday work their way out of manual labor into white collar jobs, such as footwear design, marketing and entrepreneurship.

"Government-run vocational training centers in Ciomas provide sewing, embroidery and welding programs. It makes no sense to the local situation, and the government should know better," Marzuki said.

Marzuki added that in order for school attendance to increase among working children, schools should offer flexible hours, be easily

accessible from children's homes and provide practical skills to solve day-to-day problems such as money management, labor rights and health care.

Having the government implement policies to eradicate child labor is one way to begin solving the problem. Another part of the equation is sparking a consumer push for fair trade footwear. This includes fair pay, the exclusion of children from hazardous work, safety precautions for adults doing hazardous work and providing the children of employees with proper education. Another way is the refusal to buy products from companies that treat their workers otherwise, and speaking up about the footwear industry's injustices.

Will Demung have his happily ever after? A house built from his hard-earned cash, attending Erna's graduation?

The moonbeams dissolve with the Tuesday dawn, and the shoemaker's elf prepares for another laborious day in the workshop. The shoemaker boss and his wife are yet to be rich and famous, and it looks like their elf has to wait even longer. ■



# Kimung Harusnya DiRumah, Bukannya Ngejablay

## Nasib Pekerja Seks Anak

**Agustinus Da Costa**

*Koran Kontan*

*Di tengah gerakan buruh yang tengah naik daun, pekerja anak yang bekerja di sektor informal ternyata belum memperoleh perhatian besar. Padahal, nasib dan upah mereka jauh lebih buruk ketimbang pekerja di sektor formal.*

**M**alam menjelang pukul 01.00 WIB, di deretan kafe-kafe di tepi pantai Cilincing, Jakarta Utara. Orang menyebutkan tempat itu Kojem, kependekan dari kolong jembatan. Lokasinya dekat Kampung Nelayan Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Tanjung Priok.

Seorang anak perempuan 15 tahun sebut saja Kimung masih terjaga. Dia melewati malam panjang di tengah dentuman musik, asap rokok dan belasan lelaki yang menenggak minuman keras. "Aku seharusnya di rumah belajar untuk sekolah besok, bukannya *ngejablay* di sini," ujar Kimung malam itu.

Sehari-hari, Kimung bekerja di Cafe Primadona, yang terletak di tepi pantai di daerah Kojem. Ayahnya orang Makassar dan bekerja sebagai nelayan. Sedangkan ibunya, asal Brebes, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Kimung punya seorang adik laki-laki berusia 12 tahun dan kini tidak bersekolah lagi.

Dari pekerjaan itu, Kimung memperoleh penghasilan sebesar Rp 200.000 sebulan. Dia juga memperoleh tambahan penghasilan dari tips para tamu dan "uang botol". Biasanya seorang tamu memberikan tips Rp 100.000 hingga Rp 200.000. Sementara uang botol ini merupakan bonus dari minuman yang ditenggak para tamu. Setiap satu botol, Kimung menerima Rp 1.000.

Tak jarang, pekerjaan Kimung menemani tamu itu berakhir di ranjang hotel di sekitar kafe. Rata-rata Kimung melayani dua hingga tiga orang tamu per malam. "Capek, Mas, kerja di sini," keluhnya.

Kimung belum setahun bekerja di kafe itu. Saban hari, dia berangkat sekitar pukul 18.00 dan pulang pukul 03.00 dini hari. Dia sempat ingin berhenti. Namun, kemiskinan dan utang keluarga kepada Mami Ijah, si pemilik kafe mengkandaskan keinginannya itu. Dalam sebulan, keluarganya harus membayar Rp 350.000 untuk kontrakan.

Sepulang bekerja, ia tak langsung tidur. Kimung membantu ibunya membantu pekerjaan rumah seperti masak dan mencuci piring. Menjelang pagi ia baru bisa terlelap.

Tak seorang teman dan bekas gurunya di SMP

dulu yang tahu kalau Kimung bekerja di warung remang-remang itu. Jika ada teman dan mantan gurunya yang bertanya tentang sekolah, dia hanya menjawab sudah tak bersekolah lagi dan hanya tinggal di rumah.

Kimung adalah satu diantara ribuan pekerja anak di Indonesia. Nasib dan hak-haknya seperti terabaikan di tengah gerakan buruh yang masif menuntut kenaikan upah dan penghapusan praktik pekerjaan alih daya.

Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2012 menunjukkan ada 1,7 juta pekerja anak. Sedangkan data ILO tahun 2008 menunjukkan bahwa ada lebih dari 4 juta anak usia 5-17 tahun melakukan pekerjaan berbahaya.

Sebagian besar menjadi pekerja seks anak. Jumlahnya diperkirakan mencapai 30% dari pekerja seks di Indonesia yang sebesar 180.000 orang.

Direktur Yayasan Anak dan Perempuan Azizah mengatakan anak-anak perempuan yang bekerja di sektor prostitusi dan tempat-tempat hiburan malam didorong oleh kemiskinan keluarga dan sindikat perdagangan. Dalam banyak kasus, dia mengungkapkan anak-anak itu dijual oleh orangtuanya kepada para geromo. Dia memastikan hampir 80% anak-anak perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Utara juga memberikan layanan seks.

Ivon da Gomez dari Icodesa Institute yang pernah mendampingi pekerja seks anak di kawasan Rawa Malang, Jakarta Utara menambahkan, faktor kebudayaan pada daerah tertentu dimana profesi pekerja seks dianggap sebagai hal yang lumrah dan konsumerisme menjadi salah satu pendorong anak-anak bekerja pada sektor prostitusi atau prostitusi terselubung. "Mereka terbiasa dengan pegang duit banyak dan hidup sangat konsumtif," ujar Ivon.

Penyebab lainnya juga karena pendidikan. Direktur Eksekutif Sekolah Tanpa Batas Bambang P. Wisudo menuding, kebijakan pendidikan nasional Indonesia yang tidak berpihak pada orang miskin sebagai pemicunya. "Pendidikan kita diskriminatif pada anak miskin, pendidikan kita hanya berpihak pada anak pintar dan anak orang kaya," tegasnya.

Sayangnya, pekerja anak ini masih luput dari gerakan buruh. Ketua Presidium Majelis Pekerja dan Buruh Indonesia Said Abdulah mengakui selama ini gerakan dan serikat buruh belum banyak mengadvokasi para pekerja di sektor informal.

Dia beralasan secara organisasi dan pemahaman hak-hak buruh pada pekerja sektor informal belum begitu kuat. "Pemahaman terkait dengan apa yang menjadi hak yang harus didapatkan masih jauh, apalagi pemahaman mereka soal kebijakan yang berkaitan dengan nasib mereka," ujarnya.

Selain itu, dia beralih persoalan di sektor informal jauh lebih kompleks. Karena itu, ke depannya, dia berharap pergerakan buruh dan serikat buruh banyak menginvestasikan waktu dan perhatian untuk mengadvokasi buruh informal.

Pemerintah sendiri mengaku tak berpangku tangan. Kepala Sub Unit Pengawasan Norma Kerja Anak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hendra Rahman mengaku sudah berusaha menarik anak-anak ini keluar dari tempat bekerja mereka. Setelah ditarik, lanjutnya, anak-anak itu kemudian diberikan pendampingan dan pelatihan di shelter-shelter yang sudah disediakan bersama LSM pendamping.

Anak-anak itu kemudian diserahkan pada pemerintah daerah untuk didampingi di shelter-shelter yang sudah disediakan. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, anak-anak

itu kemudian dikembalikan ke bangku sekolah, baik dalam bentuk pendidikan formal, nonformal maupun pendidikan keterampilan.

Pemerintah juga melakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi bagi orang tua dan keluarga pekerja anak lewat Program Keluarga Harapan. Logikanya, keluarga yang berdaya secara ekonomi tidak akan lagi mendorong anak-anaknya untuk bekerja.

Pada 2013 nanti, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengaku juga menyiapkan program untuk memberantas pekerja dibawah umur. Program tersebut mencakup pengawasan, bantuan sosial, pelatihan dan sosialisasi.

Hendra menegaskan, anak-anak tersebut harus dikembalikan ke sekolah apalagi saat ini sudah banyak pendidikan gratis. "Jadi tinggal ada sosialisasi yang berupa pencegahan dan penegakan aturan," tuturnya.

Ivona Gomez berharap pendekatan personal untuk membangkitkan kesadaran juga dilakukan terhadap anak-anak yang terjebak dalam prostitusi. Katanya, pendekatan personal ini lebih efektif untuk mengeluarkan anak-anak tersebut dari pekerjaan terburuk bagi anak.

Dengan begitu, dia berharap tidak ada lagi Kimung-Kimung lain yang akan bernasib serupa. "Aku sih kalau sekolah lagi inginnya jadi pramugari," ujar Kimung. ■





# WRITERS' PROFILES

## Adhitya Himawan



Adhitya Himawan, S.IP, lahir Jepang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 14 Desember 1985. Lulusan Ilmu Pemerintahan (Saat ini berubah nama menjadi Jurusan Politik dan Pemerintahan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2009 ini mengawali karier jurnalistik pada 2009. Pertama kali menjadi reporter pada Majalah Mingguan Hukum FORUM Keadilan, Majalah Mingguan Politik MIMBAR POLITIK, dan saat ini bekerja sebagai jurnalis di Majalah Bulanan MEDIA PEMBARUAN.

Selama menjadi mahasiswa pernah aktif di organisasi HMI Cabang Bulaksumur juga di organisasi kemahasiswaan Jamaah Muslim Fisipol 2004. Saat ini Adhitya aktif menjadi pengurus Divisi Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Untuk korespondensi Adhitya bisa dihubungi melalui 0813 1506 1502 atau melalui email [adhityagovernance04@yahoo.com](mailto:adhityagovernance04@yahoo.com).

## Ezra Sihite

Ezra Sihite, lahir di Tarutung 17/12/1984. Saat ini, Chacha, demikian dia biasa disapa, menjadi jurnalis di media online [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com). Chacha tinggal Jl Dr Susilo 2 no 47 Jakarta



Barat. Dia biasa berkorespondensi melalui email [ezra-natalyn@gmail.com](mailto:ezra-natalyn@gmail.com).



## Hamluddin

Terlahir dari lingkungan keluarga sederhana, di sebuah kota kecil di Masamba, bagian paling utara dari Provinsi Sulawesi Selatan, 31 tahun lalu. Anak terakhir dari pasangan

Abdul Karim (alm)- Mihada ini, kini bekerja sebagai Koresponden Tempo dan Kantor Berita Radio (KBR) 68 H Jakarta. Dia juga aktif pada sejumlah kegiatan, seperti mengelola program Inside Journalist di Radio Dakta Bekasi, suatu program bincang-bincang seputar persoalan terkini di Kota/ Kabupaten Bekasi yang mengudara setiap akhir pekan. Sebagai staf pengajar pada Program Studi Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik, Universitas Islam "45" Bekasi, sembari dalam proses menyelesaikan pendidikan untuk program Master Komunikasi Pembangunan di IPB.

## Evi Tresnawati Sihombing

Namanya Evi Tresnawati. Menjadi seorang jurnalis merupakan "kejutan" terbesar yang pernah ada dalam hidupnya. Wanita berdarah batak ini lulus dari Manajemen Komunikasi, Universitas Padjadjaran pada Agustus 2011 dan menjadi jurnalis majalah detik sejak Desember 2011. "Semangat Terus Sampai Mati" menjadi quote yang ia pegang sambil terus mengiringi langkahnya hingga ia tahu apa itu lelah. Email [apelmerahmeriah@gmail.com](mailto:apelmerahmeriah@gmail.com)



## Agustinus Beo da Costa

Agustinus B. da Costa lahir di Ende, Flores Nusa Tenggara Timur 31 tahun yang lalu. Setelah menyelesaikan kuliah di Fakultas Satria Roman Universitas Gadjah Mada tahun 2008, ia bekerja sebagai reporter di koran Jepang Mainichi Shimbun dan kemudian [jurnalparlemen.com](http://jurnalparlemen.com). Sekarang ia melanjutkan kariernya di harian ekonomi dan bisnis Kontan sejak Oktober 2012. Selain menggeluti profesi sebagai jurnalis, ia juga melanjutkan hasrat berorganisasinya di Aliansi Jurnalis Independen Jakarta sebagai staff divisi pendidikan. Email [reporterjak@gmail.com](mailto:reporterjak@gmail.com)

## G. C. Susetyo

Grace Susetyo, biasa disapa Grace bekerja untuk Berita Satu TV/ First Media News sebagai reporter. Gadis ini lulusan dari jurusan seni pertunjukkan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi London School of Public Relations. Pernah menetap dan sekolah di Belanda. Travelling merupakan hobinya. Dia bisa dihubungi di email [g.c.susetyo@gmail.com](mailto:g.c.susetyo@gmail.com)



